



TB News

TRIBRATA

AKTUAL & FAKTUAL



**BERSAMA RAKYAT
MENJADI POLISI
PEJUANG**



TRIBRATAnews • Edisi VII 2025

MEMBUKA RUANG TRANSPARANSI PUBLIK



80

Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju



**HARI JUANG POLRI 2025, KAPOLRI
BERI TALI ASIH UNTUK KELUARGA
M. JASIN DAN VETERAN**

DIVISI HUMAS POLRI



EDITORIAL

Pelindung
KAPOLRI, WAKAPOLRI

Penasehat
KADIVHUMAS POLRI

Ketua Pengarah
**KARO PENMAS, KARO PID, KARO MULTIMEDIA,
PENATA KEHUMASAN POLRI UTAMA**

Staf Ahli
PARA KABAG DIVHUMAS POLRI

Pemimpin Redaksi
**KOMBES POL. BAMBANG TJAHO BAWONO, S.I.K.,
S.H., M.HUM., M.SI.**

Staf Redaksi
**KOMPOL RUDI HARTONO, S.Kom., S.I.K.,
M.Kom., M.I.K.**
PEMBINA AGUSTIN EKAWATI, S.E.
IPTU DITA PRIMA JUWITA, S.I.Kom.
IPDA NIFRINAS YULISTIN RIZKY, S.I.Kom.
PENDA I HARYATI, S.E.
**IPDA I DEWA GEDE YUDHA PERWIRA ADHI
PRADNYANA, S.Kom.**
BRIGADIR AMANDA SILFIA, S.H.
BRIPDA ALDI RASYID
BRIPDA IRSYAD KOVA ANUGRAH SIREGAR
BRIPDA CINTA AMELIA PUTRI AHMAD

Art Director
AGUNG SUPRIYANTO WIDADI, S.Ds.

Fotografer
BAG PRODDOK
DIVHUMAS POLRI

Penerbit
BAG PENSAT
DIVHUMAS POLRI

Kontributor
SATKER MABES/SATWIL POLDA

Percetakan
PT Arfi Dua Satu

Alamat Redaksi
Bag Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri
Jalan Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7218141, 7218770
Faks. (021) 7260208, 7218141

Polisi Pejuang

Kemerdekaan tidak pernah datang sebagai hadiah. Ia dipertahankan dengan darah, keringat, dan pengorbanan. Di antara para pejuang itu, ada kekuatan yang kerap terlupakan: polisi.

Sejarah kemerdekaan tidak hanya dituliskan oleh dentuman senjata dan pekik merdeka di medan perang. Ada pula cerita tentang barisan polisi yang memilih berdiri di sisi rakyat, menanggalkan seragam kolonial, lalu mengikrarkan diri sebagai pengawal Republik yang baru lahir.

Sehari setelah Proklamasi, pasukan Polisi Istimewa di berbagai daerah tampil ke hadapan rakyat bukan sekadar sebagai aparat ketertiban, melainkan sebagai pejuang yang memilih berdiri di sisi Republik.

Ikrar 250 personel Polisi Istimewa Surabaya pada 21 Agustus 1945 menjadi tonggak yang kini kita kenang sebagai Hari Juang Polri. Saat itu, mereka menanggalkan atribut kolonial dan mengumandangkan tekad: hanya ada satu kesetiaan, kepada Indonesia merdeka.

Di Surabaya, figur seperti Inspektur Polisi M. Jasin membuktikan bahwa polisi bukan hanya pengawal hukum, tetapi juga garda terdepan revolusi. Mereka bertempur di jalanan, mengibarkan Merah Putih, dan menjaga agar simbol kedaulatan itu tetap berkibar di tengah ancaman kembalinya kekuasaan asing.

Dalam banyak pertempuran awal, polisi sering kali berdiri paling depan, menjadi jembatan antara rakyat dan tentara dalam mempertahankan kemerdekaan.

Semangat itu menegaskan identitas polisi Indonesia: bukan sekadar aparat yang menjaga ketertiban, melainkan polisi pejuang – yang lahir dari rahim perjuangan rakyat, menyatu dengan denyut bangsa.

Maka, setiap kali kita memperingati Hari Juang Polri, sesungguhnya kita sedang mengingatkan diri bahwa tugas kepolisian bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kemerdekaan, kedaulatan, dan kepercayaan rakyat.

Kini, setelah Kemerdekaan Republik Indonesia genap delapan dekade, tantangan sudah berubah. Polisi tidak lagi bertempur di medan pertempuran fisik, tetapi di medan kepercayaan publik. Mereka berhadapan dengan kejahatan, disruptif teknologi, dan godaan korupsi yang bisa meruntuhkan wibawa hukum. Namun, semangat juang itu tetap sama: menjaga bangsa, melindungi rakyat, dan memastikan merah putih tetap berkibar dengan tegak.

Hari Juang Polri bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Ia adalah pengingat, bahwa polisi yang dicintai rakyat adalah polisi yang berjiwa pejuang yakni berani, bersih, dan berpihak pada kebenaran. Api perjuangan itu tak boleh padam. Sebab, tanpa polisi yang setia pada rakyat, cita-cita kemerdekaan akan kehilangan penjaganya.*

Redaksi Majalah **Tribrata News**

menerima kiriman naskah atau tulisan tentang Kepolisian atau ilmu pengetahuan umum maupun artikel lainnya.
E-mail: pensat.divhumas@gmail.com



08

D**aftar ISI**

Edisi VII 2025

08 laporan **UTAMA**

Hari Juang Polri: Ketika Polisi Menjadi Garda Depan Republik

Sejak hari-hari pertama kemerdekaan, polisi tampil sebagai garda depan Republik tak sekadar sebagai penegak hukum, melainkan pejuang yang menegakkan Merah Putih dan menegaskan diri sebagai Polisi Republik Indonesia.

20 **UNGKAP KASUS**

- **KASUS BRIGADIR NURHADI: TRANSPARANSI PENYIDIKAN DAN ASISTENSI BARESKRIM**



62

28 **KABAR JAJARAN**

- **PACU JALUR 2025, MENGAWAL TRADISI, MENJAGA HARMONI**



Foto Cover
Peringatan Hari Juang Polri
Sumber: Istimewa

66 **INSPIRATIF**

- **GAMPONG KAMENG FARM: USAHA MANDIRI Bhabinkamtibmas ACEH BESAR**

42 **INOVASI**

- **SEMANGAT MERAH PUTIH, POLRI HADIR MENYAPA MASYARAKAT**

78 **BUAH BIBIR**

- **POLISI TURUN TANGAN BERSIHKAN SAMPAH PASCA DEMO DI PATI**

54 **BUNGA RAMPAI**

- **GERAKAN PANGAN MURAH, KEHADIRAN POLRI DI TENGAH MASYARAKAT**



80

Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

KEPALA DIVISI HUMAS POLRI
BESERTA STAF DAN JAJARAN

Mengucapkan

SELAMAT HARI JUANG POLRI



21 Agustus 2025

*Dengan Semangat Hari Juang, Polri untuk
Masyarakat Menuju Indonesia Maju*



Kepala Divisi Humas Polri
Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan. Jenderal Sigit meresmikan dua SPPG hingga Gerakan Pangan Murah Polda Kalimantan Selatan di Auditorium Mapolda Kalsel, Kamis 21 Agustus 2025.

Pada kunjungan tersebut Kapolri juga melakukan dialog interaktif dengan polres jajaran Polda Kalsel. Dia juga berdialog dengan penerima bantuan bedah rumah, sumur bor, dan kolam bioflok.

Turut hadir di acara tersebut Dankorbrimob Polri Komjen Imam Widodo, AS SDM Kapolri Irjen Anwar, Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, Kadivpropam Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Irjen Sandi Nugroho, Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Edy Murbowo, dan Wakasatgas MBG Polri Irjen Nurworo Danang.

Sampai saat ini diketahui Polri telah memiliki 458 SPPG dengan total estimasi penerima manfaat mencapai 1,6 juta orang serta menyerap tenaga kerja sebanyak kurang



lebih 22.900 tenaga kerja. Dari SPPG tersebut, sebanyak 49 SPPG telah beroperasional, 21 SPPG masih dalam tahap operasional, 378 SPPG dalam tahap pembangunan, dan 10 SPPG baru saja dilakukan groundbreaking. [*]

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Langitan Tuban Jawa Timur K.H. Abdullah Faqih atau Gus Ubed di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Silaturahmi dihadiri para ulama pengasuh pondok pesantren Langitan dan sejumlah tokoh di antaranya ketua MUI Kabupaten Tuban serta para pimpinan Pondok Pesantren Nursalam Wali Songo. Turut mendampingi pula antara lain Gubernur Jawa Timur Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur. Kegiatan tersebut juga dihadiri lebih dari 5.000 santri.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri turut menyerahkan bantuan berupa perlengkapan belajar untuk 30 santri yatim piatu di Ponpes Langitan. Acara ini dihadiri lebih dari 5.000 santri. Sebagai informasi, pesantren ini memiliki jumlah santri terbanyak di Jawa Timur.





Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi inspektur upacara pada Hari Juang Polri yang dilaksanakan di Monumen Perjuangan Polri, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 21 Agustus 2025.

Sejumlah mantan Kapolri hingga pati Polda Jatim turut hadir dalam kegiatan ini, termasuk di antaranya Jenderal (Purn) KPH Roesdihadrjo, Jenderal (Purn) S Bimantoro, hingga Jenderal (Purn) Sutarmen.

Upacara ini juga dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri, yakni Kabaharkam Polri Irjen Karyoto, Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Dankorbrimob Komjen Imam Widodo, AS SDM Kapolri Irjen Anwar, Kadivpropam Irjen Abdul Karim, Kadiv Humas Irjen Sandi Nugroho, Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho, hingga Kapusjara Polri.

Turut hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Pangkoarmada II Laksda TNI GP Alit Jaya, hingga Wakajati Hari Wibowo. Kemudian ada juga keluarga M Jasin dan Moekar, juga veteran penghargaan Seroja Timor Timur.



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyapa langsung warga masyarakat yang meramaikan karnaval HUT ke-80 Republik Indonesia di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu 17 Agustus 2025.

Kapolri yang berjalan beriringan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi menyapa masyarakat usai pertunjukan drone show dan pesta kembang api.

Dalam momen tersebut, Kapolri tampak mengenakan seragam dinas dengan balutan atribut adat Papua, berupa penutup kepala bulu, kalung etnik, hingga rok rumbai. Sementara Prasetyo Hadi tampil sederhana dengan kemeja putih dan celana hitam, terlihat tertawa saat mendampingi Kapolri menyapa masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri juga didampingi Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho serta Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro. [*]



■ Peringatan Hari Juang Polri



BERSAMA RAKYAT MENJADI POLISI PEJUANG

Hari-hari pertama kemerdekaan membuktikan bahwa polisi adalah bagian tak terpisahkan dari revolusi. Bukan sekadar menjaga ketertiban atau menjalankan tugas administratif, tetapi juga berdiri di garis depan pertempuran, mengibarkan Sang Merah Putih, dan mengikrarkan kesetiaan kepada Republik yang baru lahir.

Di tengah kekosongan kekuasaan, polisi tampil sebagai kekuatan yang paling siap secara organisasi dan persenjataan. Peristiwa-peristiwa sejarah itulah yang mencatat Bhayangkara sebagai "polisi pejuang." Sebutan yang tidak hanya menegaskan peran polisi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawal proklamasi, penopang revolusi, dan menjaga nyala kemerdekaan di saat bangsa ini masih rapuh.

Semangat itulah yang diwariskan hingga kini, menjadi fondasi Hari Juang Polri sebagai pengingat bahwa sejak awal, polisi adalah bagian dari denyut nadi perjuangan bangsa.



Hari Juang Polri:

Ketika Polisi Menjadi Garda Depan Republik

Sejak hari-hari pertama kemerdekaan, polisi tampil sebagai garda depan Republik tak sekadar sebagai penegak hukum, melainkan pejuang yang menegakkan Merah Putih dan menegaskan diri sebagai Polisi Republik Indonesia.





Pada hari-hari awal kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa ini menghadapi situasi yang serba darurat. Proklamasi 17 Agustus 1945 memang telah memerdekakan Indonesia secara politik, tetapi secara nyata bangsa masih harus berhadapan balatentara pendudukan Jepang serta kedatangan Sekutu dan Belanda yang ingin kembali berkuasa.

Sejak masa Hindia Belanda hingga pendudukan Jepang, kepolisian sudah memiliki struktur organisasi, peralatan, dan disiplin yang terlatih. Pada kondisi itu, polisi menjadi satu-satunya kesatuan yang relatif siap secara tempur.

Setelah kemerdekaan diproklamasikan, para perwira muda seperti Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo segera menegaskan bahwa kepolisian berdiri di pihak Republik. Dukungan ini membuat polisi tampil lebih awal dalam mengisi kekosongan aparat keamanan negara.

Dengan persenjataan yang diwarisi dari zaman kolonial dan Jepang, polisi menjadi garda depan dalam menjaga keamanan kota, mengatur ketertiban, hingga ikut serta menghadapi pasukan asing. Polisi tidak hanya menjalankan tugas kepolisian, tetapi juga bertempur bersama rakyat mempertahankan proklamasi.

Peran tersebut menjadikan polisi dikenal sebagai "polisi pejuang." Tidak sekadar aparat penegak hukum, melainkan bagian dari kekuatan revolusi fisik yang menopang lahirnya TNI. Maka, ketika Tentara Keamanan Rakyat (TKR) baru dibentuk pada Oktober 1945, polisi sudah lebih dulu beroperasi di lapangan. Menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah di masa-masa paling kritis berdirinya Republik.

Semangat tersebut juga tercermin di Semarang. Pada 17 Agustus 1945, kabar proklamasi sampai ke kota itu saat rapat Komite Persiapan Indonesia Merdeka yang dipimpin Mr. Wongsonegoro di Gedung Jawa Hokokai. Kabar kemerdekaan segera menyebar dan menyalakan euforia rakyat. Kota Semarang hari itu dipenuhi kegembiraan, meski tentara Jepang yang masih berkuasa berusaha mempertahankan status quo pasca kekalahan di Perang Pasifik.

Paling Siap

Kalkulasi kekuatan di Semarang tampak tidak menguntungkan bagi rakyat. Pasukan PETA dan Heiho sudah dilucuti persenjataannya, sementara laskar rakyat masih tercerai-berai. Jepang merasa di atas angin, kecuali mereka luput memperhitungkan satu kekuatan: Tokubetsu Keisatsutai. Kesatuan ini merupakan polisi istimewa bentukan Jepang pada 1943, dipersenjatai ringan, dan dianggap elite dalam struktur kepolisian zaman itu.

Statusnya sebagai polisi membuat satuan ini tidak tersentuh pelucutan senjata. Jepang membiarkan mereka tetap bersenjata, dengan maksud tertentu. Namun, justru di luar perkiraan, para anggotanya memilih berpihak pada Republik.

Berselang sehari setelah proklamasi, Nitto Keibu R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesoemo – wakil komandan Tokubetsu Keisatsutai Jawa Tengah- hadir dalam pertemuan rahasia bersama tokoh nasionalis di Rumah Sakit Purusara. Pertemuan itu menyepakati rencana memaklumkan bahwa sejak 19 Agustus 1945, pukul 13.00, Semarang dan sekitarnya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keputusan itu segera diwujudkan. Pada 20 Agustus 1945, Tokubetsu Keisatsutai resmi berganti nama menjadi Pasukan Polisi Istimewa dan menyatakan kesetiaan pada Republik. Upacara penyerahan dilangsungkan di markas besar mereka, Jalan Bojong Belakang No. 2. Dalam upacara penuh simbol, Bambang Soeprapto menyerahkan bendera Jepang Hinomaru kepada perwira Jepang Kawahara, lalu memerintahkan pengibaran Sang Saka Merah Putih.



Sejarawan Hendi Jo dalam bukunya Polisi Istimewa di Tengah Revolusi mencatat, secara historis Pasukan Polisi Istimewa pimpinan Bambang Soeprapto adalah kesatuan polisi bentukan Jepang pertama yang secara resmi menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Keputusan itu menandai lahirnya peran polisi sebagai bagian dari kekuatan revolusi di Semarang, yang kelak dikenal lewat kiprah mereka dalam Pertempuran Lima Hari 14-19 Oktober 1945 yang brutal itu.

Gelombang semangat serupa juga menyala di Surabaya, kota pelabuhan yang menjadi pusat pergerakan di Jawa Timur. Tak berbeda dengan di Semarang, kabar Proklamasi Kemerdekaan juga dengan cepat sampai di kota itu melalui jaringan pemuda dan tokoh pergerakan. Dalam hitungan jam, kabar itu menyebar ke berbagai penjuru kota. Suasana Surabaya yang sebelumnya sunyi dalam bayang-bayang kekalahan Jepang sotak berubah. Semangat merdeka meledak dalam bentuk

pengibaran Merah Putih di kantor-kantor, sekolah, hingga rumah-rumah rakyat.

Tentu pengibaran Merah Putih bukan tanpa risiko dengan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap dan mati-matian mempertahankan status quo. Banyak perkelahian kecil pecah hanya karena rakyat berusaha mengganti Hinomaru dengan Sang Saka Merah Putih. Di tengah ketegangan ini, Pasukan Polisi Istimewa menjadi faktor penentu.





Kepeloporan

Dalam buku Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang: Meluruskan Sejarah Kelahiran Polisi Indonesia, M. Jasin mengaku kabar proklamasi diterima dari seorang bawahannya yakni agen Polisi III Nainggolan yang mencuri dengar dari kantor berita Domei.

Nainggolan menemui rekannya Sugito dan sepakat mengusahakan bendera merah putih sekaligus menyiapkan pengibarannya hari Minggu pagi tanggal 19 Agustus 1945 di markas Tokubetsu Keisatsu Tai. Markas itu dulu menempati gedung sekolah di Coen Boulevard yang sekarang menjadi Jalan Polisi Istimewa, Surabaya.

"Ketika pimpinan Jepang dari markas kesatuan itu yang pada hari itu masuk kantor melihat bendera Jepang tidak berkibar lagi dan bendera merah putih menggantikan tempatnya, ia marah dan dengan tegas memerintahkan memanggil para pengibar bendera merah putih," tulis Jasin dalam memoarnya.

Melampiaskan kemarahannya, si komandan Jepang itu juga mulai main tangan. Ia menempeleng sekaligus memerintahkan agar bendera Merah Putih kembali diturunkan dan Hinomaru kembali dikibarkan. Perintah itu dituruti sehingga bendera Jepang berkibar kembali.



Tentu saja perlakuan itu membuat darah Nainggolan dan Sugito yang dengan spontan berlari kembali ke tiang bendera diikuti anggota Tokubetsu Keisatsu Tai berkebangsaan Indonesia yang lain. Aksi itu ternyata ditonton para pemuda yang berada di sekitar markas. Segera saja mereka membantu termasuk melindungi tiang bendera dan sekitarnya dengan lilitan kawat berduri.

Membahas perkembangan terbaru itu, keesokan harinya nyaris semua anggota Tokubetsu Keisatsu

Tai berkebangsaan Indonesia datang. Mereka mengadakan pertemuan untuk merumuskan tindakan berikutnya yang menyepakati aksi bersama. Mereka akan memutuskan hubungan telepon ke luar, menawan pimpinan Tokubetsu Keisatsu Tai bangsa Jepang, membongkar gudang senjata dan berikrar sebagai Polisi Republik Indonesia (PRI). Mereka juga sepakat menunjuk Jasin sebagai pengikrar serta menyebar luaskan berita proklamasi kepada masyarakat.

Tak menunggu waktu berlalu, tepat setelah pertemuan mereka langsung membongkar gudang senjata, memutuskan jaringan telepon dan menawan pimpinan Tokubetsu Keisatsu Tai seperti Chuma, Honda dan Kyoke yang segera menyerah tanpa perlawanan. Mereka juga menyita truk-truk hingga bahkan kendaraan lapis baja yang segera saja ditulisi "Polisi Republik Indonesia" serta dipasang bendera Merah-Putih.





Pada hari esoknya, Selasa 21 Agustus 1945 tepat pukul 07.00 semua anggota Pasukan Polisi Istimewa berkebangsaan Indonesia yang jumlahnya mencapai 250 mengikuti apel di halaman markas dengan bendera Merah-Putih yang tetap berkibar sejak hari sebelumnya.

Setelah seluruh pasukan disiapkan, Jasin yang kala itu masih berumur 25 tahun tampil membacakan kebulatan tekad para Bhayangkara untuk menjadi Polisi Republik Indonesia.

Maklumat itu lantas diketik dan disebar atau ditempel di tepi jalan-jalan besar. Setelah apel dan proklamasi, Pasukan Polisi Istimewa yang berubah nama menjadi Polisi Republik Indonesia ke luar markas menggelar parade menggunakan kendaraan-kendaraan lapis baja dan truk lengkap dengan bendera merah putih menuju Jalan Tunjungan, Surabaya.

Hari ketika M. Jasin memaklumatkan tekad itulah yang kemudian ditetapkan sebagai

Hari Juang Polri. Refleksi atas peristiwa-peristiwa di Semarang dan Surabaya menyingkap satu hal yang kerap terlupakan: sejak detik-detik pertama Republik berdiri, polisi telah meneguhkan dirinya sebagai kekuatan pejuang. Mereka tidak sekadar menjaga ketertiban, melainkan turut menanggung risiko dan berada di garis depan perlawanan.

Ketika tentara reguler Republik belum terbentuk, polisi tampil lebih dulu mengisi kekosongan aparat keamanan negara. Dari Bambang Soeprapto di Semarang hingga M. Jasin di Surabaya, kepolisian menunjukkan bahwa mereka bukan warisan kolonial semata, melainkan bagian dari rahim revolusi. Mereka berdiri bersama rakyat, mengibarkan Merah Putih, dan menegaskan loyalitas pada proklamasi yang baru saja dikumandangkan.

Sejarah awal kemerdekaan menunjukkan, polisi Indonesia bukan sekadar pewaris struktur kolonial, tetapi bagian dari rahim revolusi. Dari seluruh wilayah yang menggaungkan semangat perlawanan seperti Semarang, Surabaya dan kota-kota lainnya meneguhkan diri sebagai polisi pejuang. Itulah identitas yang diwariskan hingga kini, ketika Hari Juang Polri diperingati setiap 21 Agustus. [*]

Polisi Republik: Identitas Sipil di Tengah Revolusi Fisik



“Di hari-hari genting setelah proklamasi, polisi Republik menunjukkan jati dirinya. Bukan lagi alat kolonial, melainkan bagian dari rakyat yang berjuang mempertahankan kemerdekaan”

Berpidato di Gedung Chuo Sangi In Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, Soekarno membayangkan kemerdekaaan sebagai 'jembatan emas'. Karena, di seberang jembatan itulah bisa disusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi.



Bagi Soekarno, menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka juga tak memerlukan syarat yang neko-neko dan njlimet. Tidak!

"Syaratnya sekedar bumi, rakyat, pemerintah yang teguh! Ini sudah cukup untuk internationalrecht. Cukup, saudara-saudara. Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, kemudian diakui

oleh salah satu negara yang lain, yang merdeka, inilah yang sudah bernama: merdeka," kata Soekarno.

"Janganlah kita gentar, zwaarwichtig, lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan! Sekali lagi saya bertanya: Mau merdeka apa tidak? Mau merdeka atau tidak?"

Hanya berselang bulan ketika kemerdekaan yang diidamkan benar terwujud pada 17 Agustus 1945, kondisi kebangsaan juga masih jauh dari kata ideal.

Jepang meski telah menyatakan penyerahan diri, secara de facto mereka masih sangat berkuasa. Di sisi lain, mereka juga terikat dengan perjanjian untuk menyerahkan bekas jajahannya kepada 'pemilik' sebelumnya. Tentu saja dalam kondisi utuh. Tentu saja, ini hal yang tidak bisa diterima seluruh rakyat Indonesia. Tak terkecuali para polisi yang karena bidang tugasnya, lolos dari upaya pelucutan senjata Jepang.





Polisi Pejuang

Satu hal yang membedakan polisi Indonesia dengan polisi-polisi di negara lain adalah sejarahnya sebagai polisi pejuang. Mereka sepenuhnya lahir dari rahim perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Sifat kejuangan itu adalah wujud dari bentuk cinta perdamaian, persatuan, rela berjuang serta keterpanggilan untuk berbakti.

Keterpanggilan itu jugalah yang membuat polisi-polisi di Kantor Polisi di Menteng, Senen, Tanah Abang, Pasar Baru, dan beberapa tempat lainnya di Jakarta secara spontan nekat menurunkan bendera Jepang sekaligus menggantinya dengan bendera Merah Putih. Peristiwa itu hanya berselang jam dari pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan Sukarno-Hatta di Jalan Pegangsaan.

Hari-hari berikutnya, pengibaran bendera Merah Putih di kantor-kantor polisi semakin meluas sampai di luar kota Jakarta, lalu ke seluruh wilayah Indonesia. Selain mengibarkan bendera Merah Putih dan menyatakan diri sebagai Polisi Republik Indonesia. Hingga secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Di sisi lain, mengukuhkan kedudukan kepolisian di Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan



Satu hal yang membedakan polisi Indonesia dengan polisi-polisi di negara lain adalah sejarahnya sebagai polisi pejuang.



Indonesia dalam sidangnya tanggal 19 Agustus 1945 memasukkan kepolisian dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang diberi nama Djawatan Kepolisian Negara atau DKN.

Tepat pada hari yang sama, di sisi lain Jepang justru membubarkan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho sekaligus melucuti persenjataannya. Praktis di hari-hari awal kemerdekaan cuma kesatuan-kesatuan polisi yang memiliki senjata. Pada beberapa kasus, sejatinya Jepang memerintahkan

polisi untuk menyerahkan senjatanya. Permintaan itu ditolak dengan tegas.

Semangat Perlawan
Keberanian polisi menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan Merah Putih bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bentuk perlawanan simbolik yang mengguncang psikologis penjajah. Polisi yang sebelumnya sering dianggap hanya sebagai alat kekuasaan kolonial tiba-tiba tampil di garda depan revolusi.

Simbolisasi itu mengandung

pesan jelas, polisi bukan lagi kepanjangan tangan penjajah asing, tetapi bagian dari rakyat yang berdaulat. Pengibaran Merah Putih di markas-markas polisi menjelma sebagai tanda lahirnya institusi baru yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai landasan.

Perlawan simbolik ini kemudian menjadi fondasi moral penting, karena rakyat melihat polisi tidak lagi berjarak, melainkan hadir sebagai saudara seperjuangan. Kepercayaan itu membuat polisi

lebih mudah diterima dalam perannya yang baru sebagai penegak hukum di sebuah negara merdeka.

Pembubaran PETA dan Heiho oleh Jepang pada 19 Agustus 1945 meninggalkan kekosongan besar dalam pertahanan bangsa. Tentara yang diorganisir di bawah Jepang dilucuti, sementara TKR (Tentara Keamanan Rakyat) belum terbentuk. Dalam masa vakum itulah, polisi muncul sebagai kekuatan bersenjata yang relatif utuh.

Senjata api yang tetap berada di tangan polisi menjadikan mereka tulang punggung keamanan di berbagai daerah. Pos-pos polisi berubah fungsi menjadi pos pertahanan, tidak jarang mereka berhadapan langsung dengan tentara Jepang yang enggan menyerahkan kekuasaan, maupun pasukan Sekutu yang datang kembali bersama Belanda.

Kekuatan bersenjata yang dimiliki polisi pada masa ini bukan hanya alat pertahanan fisik, melainkan juga modal politik. Polisi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki institusi yang mampu berdiri sendiri menjaga ketertiban, sekaligus menegaskan kedaulatan negara baru.

Fondasi Sipil

Setelah Indonesia Merdeka, Presiden Soekarno menunjuk R. S. Soekanto untuk membentuk kepolisian nasional. Sejak awal, Soekanto menegaskan bahwa kepolisian negara harus berbeda dari warisan kepolisian kolonial Belanda maupun Keisatu bentukan Jepang. Kepolisian kolonial Belanda selama ini hanya menjadi alat politik penguasa, sementara Jepang menanamkan sifat militeristik pada aparat kepolisian di masa pendudukan.

Tantangan muncul karena saat itu Indonesia masih berada dalam masa revolusi fisik. Polisi tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga terjun sebagai kombat di garis depan pertempuran.

Soekanto melihat risiko besar ini: jika polisi terlalu lama terjebak dalam perang, sementara karakter sipil belum terbentuk dengan kuat, mereka akan kesulitan beradaptasi kembali sebagai aparat pelindung dan pengayom masyarakat di masa damai.

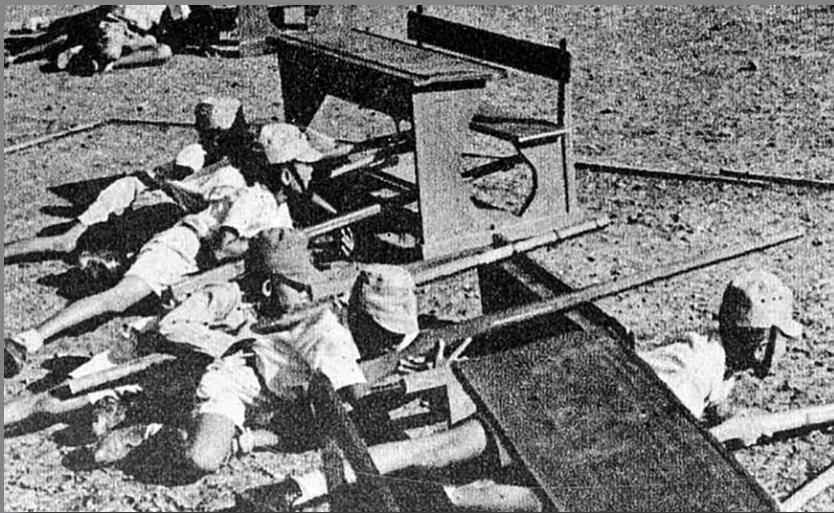
Pemikiran Soekanto begitu mendasar. Ia menginginkan polisi Indonesia tumbuh dengan identitas kuat sebagai pelayan masyarakat. Namun menurut Soekanto, tanpa fondasi sipil yang kokoh, polisi

akan kehilangan ruang refleksi dan cenderung menjauh dari jati dirinya sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri.

Kegelisahan itulah yang terekam jelas dalam pidato Komisaris II, T. Soedarsana pada konferensi Angkatan Muda Polisi Republik Indonesia seluruh Jawa dan Madura di Yogyakarta, 30-31 Maret 1946.

"Lebih tegas, pihak rakyat masih tipis kepercayaannya pada golongan kita, kaum Polisi, tidak





perduli si tua maupun si muda. Kalau rakyat masih mempunyai pandangan yang begitu terhadap kita, ini memang tidak aneh. Sebab dasarnya kita di dalam dua zaman yang lampau – Belanda dan Jepang, menjadi alat penindasan dan penjajahan,” kata Soedarsana seperti dituliskan dalam Pearl Harbour Hiroshima Nagasaki Jejak Perjalanan Perjuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia karya Arif Wachjunadi.

Menurut Soedarsana, di masa penjajahan baik Belanda maupun Jepang, tak semua orang termasuk polisi dapat bersatu. Ada yang

berjuang keras untuk rakyat, namun tak sedikit yang merelakan diri untuk bertindak sebagai antek-antek kolonial. Polisi, khususnya yang pribumi kesulitan menempatkan diri dalam tugasnya.

Semangat Rakyat

Sejarah kepolisian di hari-hari awal kemerdekaan menunjukkan bahwa polisi Indonesia bukan hanya sekadar aparat penegak hukum, tetapi juga pejuang yang terjun langsung dalam pergulatan mempertahankan kemerdekaan. Perlawanan simbolik dengan menurunkan bendera Jepang dan mengibarkan Merah Putih

adalah bukti keberanian moral. Sementara keberadaan senjata yang tetap mereka kuasai menjadi faktor strategis dalam masa vakum kekuasaan, saat rakyat Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri.

Dari perjalanan itu, terlihat bahwa jati diri polisi Indonesia tidak lahir dari warisan kolonial maupun militer pendudukan, tetapi dari semangat rakyat untuk merdeka. Identitas ini seharusnya menjadi pengingat abadi bahwa kepolisian adalah bagian dari rakyat, lahir untuk melindungi rakyat, dan berjuang bersama rakyat.

Dalam konteks kekinian, refleksi ini menjadi penting karena Polri menghadapi tantangan baru: menjaga keamanan di tengah perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan dinamika politik global. Jika di masa lalu polisi diuji oleh kolonialisme dan pendudukan asing, maka hari ini polisi diuji oleh kebutuhan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kepercayaan publik. Semangat sebagai polisi pejuang yang lahir dari rakyat harus terus diwariskan, bukan hanya dalam menjaga keamanan fisik, tetapi juga dalam merawat demokrasi, melindungi hak-hak masyarakat, serta menjadi sahabat rakyat dalam kehidupan sehari-hari. [*]





UNGKAP KASUS

KASUS BRIGADIR NURHADI: TRANSPARANSI PENYIDIKAN DAN ASISTENSI BARESKRIM



Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan rekonstruksi kasus kematian Brigadir Muhammad Nurhadi yang terjadi di Villa Tekek, Gili Trawangan, Lombok Utara, Rabu 16 April 2025.

Pada rekonstruksi tersebut sebanyak 88 adegan diperagakan langsung oleh tiga tersangka, yakni Kompol I Made Yogi Purusa Utama, Ipda Haris Chandra, dan Misri Puspita Sari.

Dirreskrim Polda NTB Kombes Syarif Hidayat menjelaskan dari puluhan adegan tersebut, 42 adegan di Gili Trawangan dinilai menjadi kunci dalam memperjelas peristiwa yang mengakibatkan kematian Brigadir Nurhadi.

"Pertama itu di rumahnya Yogi ada tiga adegan, di kantor Polda NTB enam adegan, di Pelabuhan Senggigi 21 adegan, di Fresh Mart 16 adegan, dan di Gili Trawangan ada 42 adegan," kata Dirreskrim Polda NTB Kombes Syarif Hidayat, Senin 11 Agustus 2025.



"Ini sudah memberikan sedikit gambaran kepada kami, bagaimana almarhum itu sampai meninggal dunia dan ditemukan di lokasi."

Selain penyidik, rekonstruksi disaksikan jaksa dari Kejati NTB, kuasa hukum tersangka, perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan kuasa hukum keluarga korban.

Kematian Brigadir Nurhadi menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian publik. Mulanya, peristiwa itu dilaporkan sebagai insiden tenggelam. Namun, hasil penyelidikan menemukan dugaan pembunuhan yang dilakukan atasan korban.

Brigadir Nurhadi yang merupakan anggota Bidpropam Polda NTB diketahui tengah berada di vila bersama dua atasannya, Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Ipda Haris Chandra, serta dua perempuan, salah satunya berinisial MPS asal Jambi. Malam itu mereka berpesta. Beberapa jam kemudian, Nurhadi ditemukan tak bernyawa di dasar kolam renang.

Keterangan awal menyebut korban tenggelam. Akan tetapi, keluarga Nurhadi menaruh curiga. Tubuh korban disebut masih menunjukkan luka yang tak sejalan dengan peristiwa tenggelam biasa. Desakan keluarga inilah yang membuat penyelidikan diperluas.



Ekshumasi yang dilakukan pada 1 Mei 2025 menjadi titik balik. Autopsi yang dilakukan tim forensik Universitas Mataram menunjukkan kematian Brigadir Nurhadi bukan semata-mata karena tenggelam, melainkan disebabkan oleh kekerasan fisik yang telah terjadi sebelumnya, khususnya cekikan yang menyebabkan patah tulang lidah.

"Patah tulang lidah umumnya menunjukkan adanya kekerasan pada area leher, lebih dari 80 persen penyebab kematian disebabkan oleh pencekikan," kata dr. Arfi Syamsun, ahli forensik yang memimpin autopsi.

Selain mengungkap adanya patah tulang lidah, tim forensik juga menemukan luka lecet, memar, dan robek di beberapa bagian tubuh, termasuk kepala, tengkuk, punggung, dan kaki kiri. Bahkan, tim forensik juga mengungkap adanya temuan cairan yang berasal dari kolam renang yang mengindikasikan bahwa korban pingsan dan tidak tenggelam secara alami.

Asistensi Bareskrim Polri
Meningkatnya perhatian publik mendorong Bareskrim Polri turun tangan memberikan asistensi terhadap penyidikan yang dilakukan Polda NTB. Dirlipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro

bertolak ke NTB mengasistensi langsung penyidikan di Polda NTB. Asistensi, dilakukan untuk mendalami hasil penyidikan.

Dia menyebut terdapat sejumlah pokok isu penting yang perlu diasistensi. Mulai peristiwa kematian, penanganan awal, proses penyelidikan, hingga penerapan pasal. "Karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan," jelas Brigjen Djuhandhani di Polda NTB pada 10 Juli 2025.

"Penetapan pasal juga masih belum final, antara opsi Pasal 359 KUHP tentang kelalaian menyebabkan kematian, Pasal 351 Ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat, maupun Pasal 338 tentang pembunuhan,"

Beberapa kejanggalan yang ditemukan Bareskrim antara lain adanya tekanan terhadap pihak medis untuk tidak mendokumentasikan luka korban, keterlambatan dalam olah TKP dan autopsi, serta belum maksimalnya pengumpulan bukti digital.

"Penetapan pasal juga masih belum final, antara opsi Pasal 359 KUHP tentang kelalaian menyebabkan kematian, Pasal 351 Ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat, maupun Pasal 338 tentang pembunuhan," jelas Djuhandhani.

Bareskrim juga menilai perlu mempertimbangkan Pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice,

mengingat adanya indikasi upaya menutupi fakta kematian korban. "Pasal ini bisa jadi sebagai petunjuk pelaku utama," tambahnya.

Selain itu, ditemukan pula sejumlah fakta tambahan terkait peristiwa yang menghilangkan nyawa salah satu insan Korps Bhayangkara. Djuhandhani menyebut terdapat bukti penggunaan narkoba oleh korban dan beberapa tersangka.

"Terdapat video yang menunjukkan korban masih hidup beberapa saat sebelum dinyatakan meninggal. Ada saksi kunci yang keterangan dan kehadirannya di lokasi perlu diverifikasi lebih lanjut," terang Brigjen Djuhandhani.

Hingga pertengahan Agustus 2025, penyidikan kasus masih berlangsung di Polda NTB dengan tiga tersangka: Kompol I Made Yogi Purusa Utama, Ipda Haris Chandra, dan Misri Puspita Sari. Kedua anggota Polri yang terlibat telah diberhentikan secara tidak hormat.

Rekonstruksi yang dilakukan di sejumlah lokasi di Lombok, termasuk Gili Trawangan, diharapkan semakin memperjelas konstruksi peristiwa yang menewaskan Brigadir Muhammad Nurhadi.

Kasus kematian Brigadir Muhammad Nurhadi menjadi sorotan publik bukan hanya karena melibatkan sesama anggota Polri, tetapi juga karena dugaan adanya kejanggalan dalam penanganan awal perkara.

Penanganan kasus juga menjadi pengingat bahwa setiap kelalaian, keterlambatan, atau dugaan penyimpangan prosedur dalam menangani perkara sensitif berpotensi merugikan kredibilitas institusi. Oleh karena itu, penyelesaian yang profesional, transparan, dan tuntas bukan hanya keadilan bagi keluarga korban, tetapi juga kunci menjaga martabat dan citra Polri di mata masyarakat. [*]





NGKAP KASUS



Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

Gagalkan Penyelundupan 80 Kg Sabu di Parepare

Dari hasil pengungkapan kasus tersebut polisi menyita puluhan kilogram sabu yang disamarkan dalam kemasan teh Cina.



Ditipidnarkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 80 kilogram di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Polisi juga menangkap dua tersangka yang berperan sebagai kurir.

Ditipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso menjelaskan bahwa pengungkapan ini berdasarkan informasi yang

didapatkan dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Jalan Mattirotasi Baru, Parepare, pada Senin, 11 Agustus 2025.

"Kegiatan penyelidikan dan penangkapan dilakukan atas informasi masyarakat karena maraknya peredaran sabu di Wilayah Pare-pare," kata Brigjen Eko Hadi dalam keterangan tertulis, Senin, 11 Agustus 2025.

Penangkapan kedua kurir narkoba dilakukan oleh tim Tim Opsnal Gabungan Subdit IV dan Tim II Satgas NIC (Narcotic Investigation Center) Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang dipimpin Kasubdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Handik Zuse.

Penangkapan tersebut juga melibatkan Katim II Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Awaludin Amin beserta Tim



Bea Cukai Pare-pare menangkap diduga kurir narkoba.

penangkapan dilakukan di Jl. Mattirotasi Baru Kabupaten Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan pada pukul 01.45 WIB, Senin, 11 Agustus 2025. Dua tersangka yang ditangkap ialah Buhori, 37 dan Muhammad Alwi, 54.

Brigjen Eko mengungkapkan pengungkapan kasus berawal pada Jumat, 25 Juli 2025 tim gabungan melaksanakan anev terkait teknis penyelidikan yang akan dilakukan di Kabupaten Pare-pare Sulawesi Selatan.

Lalu, pada Minggu, 27 Juli 2025 tim gabungan Subdit IV, Satgas NIC dan Tim Bea Cukai berangkat ke Sulawesi Selatan melaksanakan penyelidikan.

Pada 11 Agustus 2025, mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di Jl. Mattirotasi Baru, Kabupaten Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan. Tim gabungan kemudian melakukan pemantauan di daerah tersebut dan menemukan mobil Suzuki Carry berisi tiga orang dan menurunkan dua orang masuk

ke mobil Mitsubishi Double Cabin berwarna putih.

"Adapun gerak gerik dua orang tersebut sangat mencurigakan. Tim gabungan langsung melakukan pengejaran dan pengamanan terhadap tiga orang tersebut," ungkap Brigjen Eko Hadi.

Setelah tim gabungan melakukan pemeriksaan dan penggeladahan didapat barang bukti sabu. Selanjutnya, tim gabungan berkonsolidasi dan melakukan pengecekan keaslian barang tersebut menggunakan Tes Kit Narkotik, hasilnya positif narkotika jenis sabu.



“Barang bukti 80 bungkus teh China ‘Gyanyinwang’ hijau dengan berat bruto 80 kilogram diduga sabu,”



Dari hasil pemeriksaan, tim gabungan memastikan barang bukti tersebut positif sabu setelah dilakukan pengecekan menggunakan tes kit narkotika. Dari 80 kg tersebut, di antaranya 2 kg sabu ditemukan di belakang kursi pengemudi, dan 78 kg lainnya ditemukan di dalam 7 karung yang disimpan di bagian belakang kabin mobil.

“Barang bukti 80 bungkus teh China ‘Gyanyinwang’ hijau dengan berat bruto 80 kilogram diduga sabu,” jelas Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso.

Tim gabungan akhirnya meringkus dua tersangka berinisial B (37) dan MA (54), serta memintai keterangan seseorang berinisial H yang berstatus sebagai saksi. Diketahui bahwa tugas antara kedua tersangka tersebut berbeda.

“Tersangka B bertugas sebagai pengendali kurir, sedangkan tersangka MA bertugas sebagai kurir,” kata Ditipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso. “Untuk H itu saksi, dia hanya mengantarkan tersangka B dan MA dari Kabupaten Barru ke Parepare, tetapi masih kami dalam keterlibatannya.”

Sementara barang bukti lain yang diamankan oleh tim gabungan meliputi uang tunai senilai Rp 20 juta, mobil Suzuki Carry, mobil Mitsubishi Double Cabin, serta hp yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya.

“Tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Ditipidnarkoba Bareskrim Polri guna dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut,” tandasnya. [*]



PACU JALUR 2025,
**Mengawal Tradisi,
Menjaga Harmoni**

Keberhasilan penyelenggaraan Pacu Jalur 2025 menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Polri memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat.

Suara rarak godang bertalu-talu, memecah kesunyian pagi di Tepian Narosa, Kuantan Singingi, Riau. Alunan ritme kayu dan besi yang saling beradu itu menjadi penanda bahwa perahu panjang yang sarat dengan puluhan anak jalur siap meluncur menantang arus Sungai Kuantan. Dari tepian, ribuan pasang mata menanti momen yang hanya hadir setahun sekali itu.

Pacu Jalur bukan sekadar perlombaan adu cepat perahu. Ia adalah pesta rakyat, ruang silaturahmi, dan simbol kebanggaan budaya Riau yang kini gaungnya semakin mendunia.

Tahun ini, gegap gempitanya makin terasa dengan kehadiran tamu-tamu istimewa, di antaranya hadir Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama sang istri, Selvi Ananda, yang didaulat melakukan flag off perlombaan. Sejumlah pejabat tinggi turut hadir meramaikan, mulai dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menpora Dito Ariotedjo, hingga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

Tidak hanya dari dalam negeri, para duta besar negara sahabat juga tampak larut menyaksikan jalannya perlombaan. Tercatat hadir Dubes Mozambik, Korea Selatan, Bangladesh, Fiji, Rwanda, Bosnia, Bulgaria, Kenya, Azerbaijan, Uni Emirat Arab (UEA), Yordania, Angola, serta perwakilan Kantor Koordinator Residen PBB di Indonesia dan International Coconut Community (ICC).

Panggung Pacu Jalur kali ini makin berwarna dengan kehadiran seorang rapper asal Amerika Serikat yang ikut menyemarakkan acara, ia adalah Milly Mike, yang namanya melejit berkat lagu Young Black and Rich, yang viral di TikTok setelah digunakan dalam tarian "Aura Farming" khas Pacu Jalur.



Di antara deru jalur yang membelah arus, suasana di tepian tak kalah meriah. Masyarakat berjejer sejak pagi, sebagian duduk beralas tikar, sebagian lagi berdiri berdesakan mencari celah pandang terbaik. Anak-anak kecil tampak asyik bersorak setiap jalur melintas, sementara para orang tua sese kali berkomentar, membandingkan kekuatan dayung antarperahu. Tahun ini, gegap gempita Pacu Jalur menyedot perhatian jutaan pengunjung tak hanya dari Riau namun dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia.

Tentu saja, keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang tengah menjadi daya tarik dunia, tak lepas dari peran seluruh pemangku kepentingan. Di tengah riuh tepuk tangan dan sorak sorai penonton, wajah ramah aparat kepolisian mudah ditemui.

Sebanyak 1.818 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, hingga Pemda diterjunkan untuk memastikan kelancaran festival tersebut. Selama empat hari penyelenggaraan, mulai dari Rabu, 20 Agustus 2025 hingga Minggu, 24 Agustus 2025 mereka

bekerja sama memastikan arus penonton yang membludak tetap tertib dan suasana pesta rakyat bisa dinikmati dengan aman.

Sejumlah upaya pun dilakukan demi kelancaran pesta rakyat tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Ditlantas Polda Riau telah memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai 18-25 Agustus 2025 di sejumlah titik, mulai dari Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Siak, hingga Bengkalis.





"Rekayasa lalu lintas dan pembatasan jam operasional truk dilaksanakan dalam rangka event Pacu Jalur 2025 di Kuansing,"

"Rekayasa lalu lintas dan pembatasan jam operasional truk dilaksanakan dalam rangka event Pacu Jalur 2025 di Kuansing," kata Dirlantas Polda Riau KBP Taufik Lukman Nurhidayat.

Selain pemberlakuan rekayasa lalu lintas, Ditlantas Polda Riau juga memberlakukan pembatasan jam operasional untuk kendaraan bertonase berat. Truk dari arah Sumatera Barat maupun Jambi yang hendak melintas ke Kuantan Singingi, begitu juga sebaliknya, diarahkan untuk menunda perjalanan selama penyelenggaraan

• Pacu Jalur. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, serta logistik penting lainnya.

• "Kendaraan bertonase berat hanya bisa melintas pada pukul 23.59 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB," kata Dirlantas Polda Riau KBP Taufik Lukman Nurhidayat.

• Sejumlah upaya itu tidak hanya menyasar arus kendaraan masyarakat, melainkan menyasar hingga tamu undangan kehormatan. Untuk menghindari penumpukan

lalu lintas menuju Tepian Narosa, helipad disiapkan sebagai akses udara bagi pejabat negara, duta besar, hingga tamu VIP lainnya.

Upaya dari Ditlantas Polda Riau terbukti membawa hasil. Lalu lintas di sekitar Tepian Narosa tetap teratur meski ribuan pengunjung memadati lokasi. Kantong-kantong parkir yang disediakan mampu menampung kendaraan, sementara petugas dengan sigap mengarahkan arus agar semuanya berjalan tertib dan aman.

Selain upaya dalam penataan lalu lintas, aparat juga gencar melakukan pengawasan terhadap

aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di sepanjang Sungai Kuantan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keselamatan perairan sekaligus melestarikan lingkungan. Aktivitas PETI yang marak dapat merusak ekosistem sungai, mencemari air, dan mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai sebagai sumber mata pencaharian.

Sejak 31 Juli 2025, Polda Riau bekerja sama dengan Polda Sumatera Barat menggelar operasi penertiban PETI. Hasilnya, 15 tersangka diamankan dan 223 rakit PETI dimusnahkan. Kapolda Riau

Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa pengawasan akan tetap berlanjut meski Pacu Jalur telah usai. "InsyaAllah kita akan pasang plang-plang pengumuman. Jika ada kegiatan ilegal, akan ada tindakan hukum secara berkeadilan," ujarnya.

Selain itu, upaya ini juga bersinergi dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lahan bekas kebakaran dipasangi plang larangan berkebun, untuk memastikan tidak terjadi kegiatan ilegal yang bisa memicu karhutla.

"Plang ini memastikan bahwa lahan yang terbakar tidak bisa lagi



dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan selanjutnya. Jadi, Polda Riau secara serius dalam melakukan upaya pencegahan, juga serius untuk melakukan penegakan hukum," jelas Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan.

Tidak hanya mengawasi kelestarian lingkungan, Polda Riau dalam upaya menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung juga menyiapkan delapan posko kesehatan di sepanjang Tepian Narosa. Posko-posko ini didirikan untuk memberikan pertolongan pertama bagi peserta dan penonton yang membutuhkan bantuan medis.

Karo Ops Polda Riau Kombes Ino Haryanto, posko-posko ini didirikan berdasarkan survei yang telah dilakukan terkait kendala-kendala medis yang mungkin terjadi pada peserta maupun penonton. "Biasanya masyarakat yang kelelahan, kehabisan oksigen, kelelahan, dan sebagainya," kata Karo Ops Polda Riau Kombes Ino Haryanto.

Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pacu Jalur hari pertama yang menyisakan banyak sampah berserakan di sepanjang Tepian Narosa, sejumlah personel dari Direktorat Polairud Polda Riau turun tangan untuk membersihkan sampah.

Dengan kolaborasi erat antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan, Pacu Jalur bukan hanya menjadi pesta budaya, melainkan juga wujud komitmen bersama menjaga tradisi, lingkungan, dan marwah Sungai Kuantan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. [*]





UNJUK RASA DI PATI, Polisi Sebagai Penjaga Kemanusiaan





Dalam demonstrasi di Pati kinerja polisi menonjol dalam beberapa aspek di antaranya perencanaan matang dan pendekatan humanis.

“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan memperbaiki sikap lagi...” Belum juga Bupati Pati Sudewo menuntaskan kalimatnya, sebuah benda melayang dilempar massa ke arahnya. Meski lemparan pertama meleset, susulan lemparan datang bertubi-tubi. Sandal, bungkus makanan, hingga botol air mineral berhamburan ke arah panggung.

Menyadari situasi yang tidak kondusif, tim pengamanan dari Satbrimob Polda Jateng bergerak

cepat. Dengan tameng anti huru-hara, Sudewo segera dievakuasi ke kendaraan taktis milik Brimob, menjauh dari kepungan massa yang marah.

Alun-Alun Kota Pati, Rabu 13 Agustus 2025, bak panggung pertunjukan kolosal. Ratusan ribu massa tumpah ruah sejak pagi. Datang dari seluruh penjuru Pati, mereka menyuarakan penolakan terhadap kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen pada tahun 2025. Diperkirakan, demonstrasi dihadiri lebih dari 100.000 orang, menjadikannya demonstrasi terbesar dalam sejarah kabupaten tersebut.

Awalnya, demonstrasi berlangsung tertib. Massa berorasi sambil membentangkan poster berisi tuntutan agar Bupati Pati Sudewo turun dari jabatannya. Keadaan berubah ketika sebagian kelompok mencoba menerobos pagar pendopo kabupaten. Mereka menuntut Bupati segera keluar menemui massa. Aparat kepolisian yang berjaga membentuk barikade, tetapi massa mulai melemparkan botol plastik dan batu ke arah aparat.



Kericuhan pun tak terhindarkan. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk mengurai massa. Situasi justru semakin kacau. Beberapa fasilitas umum dirusak, pagar pendopo kabupaten dijebol, bahkan sejumlah orang memaksa menerobos barikade polisi.

Ketegangan sedikit mereda setelah Bupati Sudewo akhirnya muncul di hadapan warga. Dengan pengawalan ketat, ia menaiki mobil taktis Brimob untuk menyampaikan permintaan maaf. Namun, baru beberapa kalimat ia ucapkan, massa tetap menyambutnya dengan lemparan berbagai benda.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menjelaskan bahwa semula unjuk rasa berlangsung aman dan damai. Namun, situasi berubah ricuh setelah muncul kelompok lain yang menyusup ke tengah massa. Asal kelompok itu belum diketahui.

"Sekitar pukul 10.30 muncul kelompok lain yang anarkis dengan melempar batu, minuman, buah busuk, hingga tongkat, sehingga eskalasi menjadi chaos," kata Artanto.

Ia menambahkan, kepolisian sudah melakukan berbagai upaya persuasif agar massa tidak

melakukan tindakan anarkis. Namun, kelompok tersebut tidak menghiraukan imbauan aparat.

Menurut data Polda Jawa Tengah, sebanyak 40 orang menjadi korban dalam kerusuhan dan dirawat di RSUD Soewondo.

Situasi juga diperparah oleh beredarnya hoaks mengenai adanya korban meninggal. Isu itu segera dibantah Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. "Kami pastikan tidak ada korban meninggal. Hingga saat ini belum ditemukan laporan resmi mengenai hal tersebut," tegas Prasetyo.





Eskalasi

Protes massal di Kabupaten Pati dipicu rencana kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Ketegangan meningkat setelah Bupati Sudewo menanggapi kritik awal dengan menantang warga untuk berunjuk rasa. Pernyataan tersebut dianggap provokatif dan memperkuat persepsi publik tentang kepemimpinan yang arrogan.

Sebagai bentuk perlawanan, warga mengorganisir diri melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang baru dibentuk, sambil mengumpulkan sumbangan untuk perlengkapan protes.

Menjelang aksi 13 Agustus, Bupati Sudewo mencoba meredakan situasi. Ia menyampaikan permintaan maaf publik dan membatalkan rencana kenaikan pajak. Di media sosial resmi Pemkab, ia menegaskan, "Saya minta maaf... Saya tidak bermaksud menantang rakyat saya." Namun, masyarakat yang terlanjur marah tak bergeming.

Ahli Kebijakan Publik Universitas Negeri Semarang, Dr. Cahyo Seftyono, menilai gejolak ini tidak sekadar soal pajak.

"Yang menjadi alasan utama justru faktor kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang

bermasalah, tidak mengayomi. PBB itu hanya pancingan terakhirnya," ujar Cahyo.

Pendekatan Humanis

Dalam demonstrasi ini, kinerja polisi menonjol dalam beberapa aspek, di antaranya perencanaan matang dengan menempatkan personel di titik kritis, jalur evakuasi, hingga pemantauan visual melalui mobil komando.

Pendekatan humanis juga diterapkan sebagai jembatan dialog dengan massa untuk menenangkan emosi dan mencegah konflik meningkat. Sejumlah petugas menyambut peserta aksi dengan sapaan ramah dan arahan singkat.

"Dari awal datang, saya langsung diarahkan dengan jelas. Polisi menyampaikan dengan sopan, jadi kita merasa dihargai," ujar salah seorang peserta.

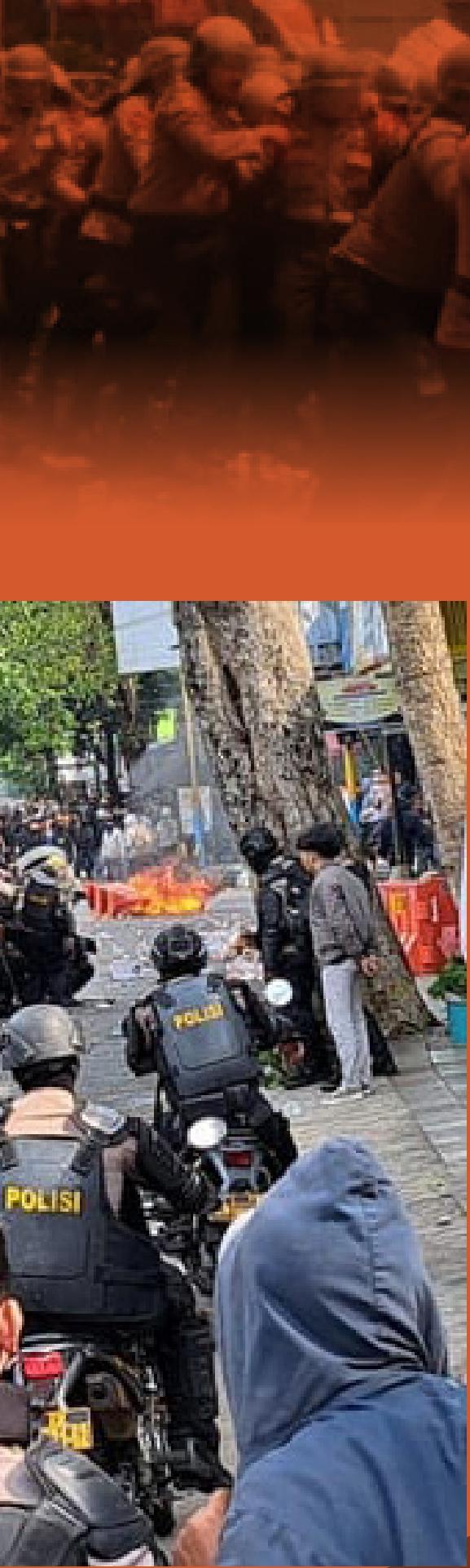
Peserta lain menambahkan, pendekatan persuasif aparat membuat suasana lebih tertib. "Mereka mengingatkan agar tetap fokus pada tujuan aksi. Disampaikannya santai tapi jelas. Kalau polisi komunikasinya enak, massa juga menyesuaikan," katanya.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pati, Ahmad Manhajussidad Shonhaji, menilai aparat kepolisian sudah menjalankan peran penting dalam menjaga masyarakat saat demonstrasi berubah ricuh. "Yang dilakukan Polri betul-betul pelindung dan pengayom masyarakat. Jangan sampai dianggap musuh," ujarnya.

Pandangan serupa datang dari Ketua PCNU Pati, Yusuf Hasyim, yang mengecam pihak-pihak

"Yang dilakukan Polri betul-betul pelindung dan pengayom masyarakat. Jangan sampai dianggap musuh,"





pemicu keributan. Ia berharap aparat tidak dijadikan sasaran. "Polisi adalah sahabat masyarakat. Mereka bertugas mengamankan negara, jangan justru dijadikan korban," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PD Muhammadiyah Pati, Muhammad Luqman, mengingatkan agar insiden 13 Agustus dijadikan pelajaran bersama. "Insyaallah peristiwa apapun ada berkah, hikmah, dan pelajaran yang bisa kita gali lebih dalam," ujarnya.

Kericuhan di Pati menjadi cermin betapa rapuhnya hubungan antara rakyat, pemerintah, dan pemimpinnya ketika komunikasi terputus. Demonstrasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kepemimpinan membutuhkan empati, kebijakan harus berpihak, dan aparat dituntut menjaga keseimbangan antara pengamanan dan kemanusiaan.

Dari insiden ini, ada pelajaran berharga yang seharusnya menjadi bekal bersama untuk membangun ruang demokrasi yang lebih sehat. [*]

Padamu Negeri, Kami Berbakti:

MERAH PUTIH BERKIBAR DI PUNCAK CIREMAI



Dari ketinggian ketinggian 3.078 meter, kabut pagi menyelimuti puncak Gunung Ciremai. Angin dingin berdesir lembut, membawa aroma pinus dan tanah basah. Di tengah cakrawala yang membentang luas, sebuah bendera Merah Putih berkibar megah, menari di antara semburat sinar matahari yang baru menembus pepohonan.

Suasana itu menjadi saksi bisu dari semangat yang tak lekang oleh waktu cinta tanah air dan penghormatan pada para pahlawan.

Puncak tertinggi di Jawa Barat itu dipilih sebagai titik puncak rangkaian kegiatan "Padamu Negeri, Kami Berbakti" oleh Polda Jawa Barat, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Dipimpin langsung Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Rudi Setiawan, pengibaran bendera Merah Putih bukan sekadar simbol seremonial. Ia adalah pengingat nyata bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan darah, keringat, dan pengorbanan panjang.

"Pengibaran bendera di puncak Gunung Ciremai ini bukan sekadar

seremoni, tetapi pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Kita ingin generasi muda selalu mengingat, menghargai, dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif demi kemajuan bangsa," ujar Kapolda Jabar kepada RRI, Senin 11 Agustus 2025.

Kegiatan ini bukan hanya tentang bendera. Sehari sebelum pendakian, rombongan peserta menanam 500 bibit pohon endemik di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dari jamuju, salam, peutag, hingga ki hujan.

Setiap bibit yang tertanam adalah simbol hidup dari komitmen Polri menjaga kelestarian alam, mewariskan bumi yang lebih hijau bagi generasi mendatang.

Di Pos 3 jalur pendakian Palutungan, Kapolda meresmikan Shelter Pesat Gatra 93, sebuah tempat berlindung bagi pendaki dari cuaca ekstrem dan lokasi evakuasi darurat. Shelter ini berdiri kokoh di tengah hutan, menandakan bahwa keselamatan dan kenyamanan pendaki menjadi prioritas, seiring dengan semangat gotong royong dan nasionalisme yang terus dijaga.

Selain itu, Kapolda Jawa Barat bersama Kapolres Kuningan menandatangani prasasti yang menegaskan tekad menjaga alam dan persatuan bangsa. Prasasti itu menjadi simbol nyata bahwa keberanian dan kepedulian dapat berjalan beriringan: merawat bumi sekaligus menegakkan cinta tanah air.

Kegiatan ini juga menyentuh masyarakat secara langsung. Pemberian santunan kepada warga yang membutuhkan menghadirkan wajah-wajah haru, senyum tulus, dan harapan baru. Di puncak Ciremai, merah dan putih tak lagi sekadar warna bendera; ia menjadi simbol persatuan, pengorbanan, dan tanggung jawab kolektif.

Di tengah dinginnya angin dan hamparan alam yang megah, pesan Polda Jawa Barat jelas: nasionalisme adalah tindakan nyata, bukan sekadar seremonial. Dari setiap bibit yang tertanam, setiap shelter yang berdiri, hingga setiap bendera yang berkibar, terdapat kisah pengabdian, kepedulian, dan cinta yang menyatu untuk negeri, untuk generasi, dan untuk kemerdekaan. [*]





NOVASI

Semangat Merah Putih,
POLRI HADIR
MENYAPA MASYARAKAT

Polri hadir membagikan Merah Putih, mengembalikan semangat kemerdekaan
ke tangan masyarakat





Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, fenomena unik menghiasi pemukiman, kendaraan, dan sudut kota: bendera bajak laut dari kartun Jepang, One Piece, berkibar di mana-mana.

Bendera Jolly Roger milik Bajak Laut Topi Jerami dikenal dengan tengkorak berhiaskan topi jerami khas Luffy, karakter utama yang bebas, pantang menyerah, dan berani menentang ketidakadilan. Di dunia fiksi, simbol itu melambangkan persahabatan, kebebasan, dan tekad mengejar impian. Namun di dunia nyata,

ketika dipasang di sepeda motor, mobil, dan rumah warga, sebagian masyarakat menafsirkan bendera itu sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah atau protes sosial-politik.

Fenomena ini menimbulkan perdebatan: apakah tren itu sekadar kreativitas, atau pertanda memudarnya kesadaran akan makna bendera kebangsaan?

Menanggapi fenomena tersebut, Polri mengambil pendekatan berbeda untuk menggelorakan semangat kemerdekaan melalui aksi nyata: membagikan bendera Merah Putih kepada masyarakat,

agar simbol negara yang suci itu kembali hadir di tangan warga.

Gerakan ini dikenal dengan nama "Gerakan Polantas Menyapa", inisiatif Korlantas Polri yang tidak hanya fokus mengatur lalu lintas, tetapi juga mendekatkan diri dengan warga. Mulai 4 hingga 10 Agustus 2025, Polantas di berbagai daerah turun langsung ke lampu merah, perempatan, hingga gerbang tol, membagikan bendera Merah Putih dan bunga mawar merah kepada pengguna kendaraan.

"Kegiatan ini bukan sekadar simbolik. Ini bentuk nyata bahwa Polantas hadir tidak hanya



sebagai pengatur lalu lintas, tetapi juga sahabat masyarakat," ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho.

Sejalan dengan tujuan gerakan ini, Kakorlantas juga mengarahkan seluruh jajaran Direktorat Lalu Lintas di Indonesia untuk terjun langsung menyejahterakan pengguna jalan dengan pendekatan humanis.

Selama satu pekan, lebih dari 214 ribu bendera Merah Putih dan 10 ribu mawar merah telah

dibagikan. Di beberapa wilayah, jajaran Polantas juga berbagi helm untuk pengendara sepeda motor sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas.

Menggelorakan Nasionalisme

Bendera Merah Putih bukan sekadar selembar kain. Ia adalah naskah sejarah yang ditenun dari penderitaan dan kemenangan bangsa. Setiap kibaran Merah-Putih

adalah pengingat Janji Proklamasi, momen di mana kita menegaskan hak untuk menentukan nasib sendiri setelah ratusan tahun berada di bawah belenggu penjajahan.

Bendera ini adalah simbol pemersatu yang mampu meredam perbedaan suku, agama, dan budaya, menyatukan kita dalam satu identitas kolektif: Indonesia. Ia adalah warisan suci yang tak ternilai, diturunkan dari generasi ke generasi, dan kehormatannya tak pernah boleh ditawar.



Di mana pun mereka berada, bendera Merah Putih hadir sebagai pengingat: kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar seremoni.

Gerakan ini tidak hanya dilakukan Polantas. Personel Ditpamobvit membagikan bendera di Car Free Day, Polres Jepara menyapa warga pasar, Polresta Bandara Soekarno-Hatta membagikan bendera di terminal bandara, dan Satpolairud hadir di pesisir untuk nelayan. Di mana pun mereka berada, bendera Merah Putih hadir sebagai pengingat: kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar seremoni.

Momen ini juga menjadi sarana membangkitkan kembali kesadaran akan nilai kebangsaan, terutama bagi generasi muda yang terpesona tren global. Kehadiran polisi di lapangan menunjukkan bahwa aparat bukan hanya pengawas, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat, hadir sebagai sahabat sekaligus pengingat semangat persatuan.

Budaya Pop

Fenomena bendera bajak laut yang sempat viral menjadi titik tolak bagi Polri untuk menegaskan: nasionalisme bisa ditumbuhkan melalui aksi nyata dan pendekatan humanis. Bendera Merah Putih yang dipasang di kendaraan, rumah, dan tangan warga bukan sekadar simbol, namun menjadi pengingat akan sejarah, pengorbanan, dan tanggung jawab menjaga kemerdekaan.

Di sisi lain, pengibaran bendera bajak laut One Piece menunjukkan bagaimana budaya pop dapat menjadi sarana ekspresi dan kritik sosial. Penting untuk memahami konteks dan pesan yang ingin disampaikan melalui pengibaran bendera ini, daripada hanya menilai dari sisi negatif atau provokatif. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa garis antara hiburan dan politik semakin tipis di era digital, di mana simbol dari dunia maya bisa masuk ke dunia nyata dan membawa dampak sosial-politik. [*]





NOVASI

Policetube,

Loncatan Digital Divisi Humas Polri

Divisi Humas menghadirkan Policetube, sebuah panggung digital untuk menayangkan wajah kepolisian yang transparan, profesional, dan dekat dengan masyarakat.



Di tengah arus informasi yang berkembang kian cepat, Divisi Humas Polri melakukan loncatan digital signifikan dengan meluncurkan Policetube, sebuah platform video digital yang menjadi pusat dokumentasi berbagai kegiatan kepolisian. Kehadiran Policetube menjadi tonggak inovasi Divisi Humas Polri dalam memperbarui sistem publikasi.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, menjelaskan bahwa sebelum adanya Policetube,

publikasi kegiatan kepolisian masih bergantung pada Sistem Pelaporan Informasi Terpadu (SPIT) dan Mediahub. Namun, kedua sistem tersebut hanya mengandalkan teks dan foto.

"Policetube digunakan sebagai media publikasi kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja di Mabes Polri. Selain itu, platform ini juga memungkinkan penyebaran informasi secara terpadu dan terintegrasi dari berbagai tingkatan kepolisian, mulai dari Polsek,

Polres, hingga Polda," jelas Irjen Sandi.

Lebih dari sekadar arsip digital, Policetube hadir sebagai sarana transparansi yang mudah diakses publik. Dengan format video, masyarakat dapat melihat secara langsung proses dan hasil kerja aparat di lapangan, sehingga potensi disinformasi dapat diminimalkan.

"Harapan kita, semua konten yang sudah dibuat oleh kepolisian bisa tertampung di Policetube.





Jadi, kalau ada yang bertanya apa buktinya polisi bekerja, silakan lihat di Policetube," tegasnya.

Policetube juga sejalan dengan semangat Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan), terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Platform ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik dan menjadi kanal resmi melawan berita hoaks.

Policetube memiliki fungsi ganda, baik untuk internal Polri maupun masyarakat luas.

Bagi publik, platform ini menjadi jendela transparansi untuk melihat bukti nyata kinerja kepolisian. Publik bisa menyaksikan berbagai kegiatan mulai dari operasi lalu lintas, bakti sosial, hingga pengungkapan kasus.

Pusat Dokumentasi

Bagi internal Polri, Policetube menjadi pusat dokumentasi yang dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kinerja, bahan pelatihan, hingga apresiasi terhadap personel.

Selain dokumentasi kegiatan, Policetube berpotensi

dikembangkan sebagai media edukasi hukum, sosialisasi layanan kepolisian, hingga kampanye kesadaran publik terkait keselamatan dan keamanan.

Policetube sendiri merupakan hasil hibah dari PT Unggul Digital Gemilang, berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada Senin, 23 Juni 2025.

"Polri mendapatkan kesempatan menggunakan sistem ini secara gratis, tanpa anggaran apa pun. Bahkan, kita didukung penuh oleh



PT Unggul Digital Gemilang," kata Irjen Sandi.

Kerja sama ini menjadi wujud konkret kolaborasi antara Polri dan sektor swasta, terutama dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang presisi dan modern.

Untuk memastikan pemanfaatan Policetube berjalan optimal, Divisi Humas Polri menggelar sosialisasi dan pelatihan pada Rabu, 30 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti 288

peserta secara langsung dan 2.080 peserta lainnya secara daring.

"Sosialisasi dan pelatihan ini penting agar jajaran Polri siap memanfaatkan inovasi Policetube secara maksimal. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat dapat terus meningkat," jelas Irjen Sandi.

Namun, Irjen Sandi juga menekankan bahwa tantangan ke depan tetap ada. Mulai dari literasi digital anggota Polri, konsistensi dalam pengunggahan konten,

"Semoga dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini, jajaran Polri semakin siap menghadapi tantangan ke depan, sekaligus memperkuat profesionalisme dan kehumasan yang modern, transparan, dan dipercaya masyarakat,"

hingga potensi ancaman serangan siber. Karena itu, komitmen seluruh jajaran kepolisian sangat dibutuhkan agar platform ini benar-benar menjadi wajah transparansi Polri.

Kehadiran Policetube diharapkan tidak hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai simbol keterbukaan Polri terhadap masyarakat. Dengan publikasi berbasis video yang akurat, mudah diakses, dan terpercaya, Polri ingin menunjukkan bahwa institusi ini terus bergerak menuju profesionalisme dan kehumasan yang modern.

"Semoga dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini, jajaran Polri semakin siap menghadapi tantangan ke depan, sekaligus memperkuat profesionalisme dan kehumasan yang modern, transparan, dan dipercaya masyarakat," tutup Irjen Sandi. [*]





Network Centric Situational Awareness (NCSA) dan Paradigma Baru Pengembangan TIK di Korbrimob Polri

oleh : KBP. Hendrik Budhi Prasetyo, S.I.K, M.Si

Dari Hub, Komlek ke TIK

Dua dekade yang lalu nomenklatur Teknologi Informasi dan Komunikasi masih merupakan peristilahan yang terdengar asing di lingkungan Polri termasuk Korps Brimob. Saat itu istilah Komlek yang merupakan kepanjangan Komunikasi dan Elektronika lebih dikenal dan membumi dibandingkan TIK.

Komlek adalah metamorfosis dari "HUB atau perhubungan" yang di masa itu merupakan unsur pelayanan yang tugas utamanya adalah penyelenggaraan dan pelayanan komunikasi di kesatuan baik melalui radio, jejaring telepon, PABX/faksimili serta segala sesuatu perangkat yang berhubungan dengan keelektronikaan/perangkat kelistrikan arus lemah.

Memasuki era milenium, ketika terjadi pergeseran pemaknaan komunikasi kesatuan yang tak lagi terfokus pada komunikasi suara namun juga komunikasi data dan gambar dan tak lagi bisa terwadahi hanya dengan frekuensi radio narrow band, namun membutuhkan jejaring broadband. Tantangan tersebut oleh Polri dan jajaran di bawahnya termasuk Korps Brimob ditindaklanjuti dengan perubahan nomenklatur Komlek menjadi TIK.

Dengan kemajuan teknologi, saat ini Korps Brimob juga telah dilengkapi dengan berbagai infrastruktur komunikasi baik broadband maupun narrowband yang fitur-fiturnya dapat saling melengkapi atau bahkan terintegrasi, tak lagi semata-mata sebagai sebuah sistem komunikasi

namun lebih luas sebagai sebuah sistem perintah, kendali, komunikasi dan informasi dalam rangka menyebarkan kesadaran situasional dari pusat pengendalian maupun unit-unit taktis yang beroperasi di lapangan secara dua arah.

Perintah, Kendali, Komunikasi dan Informasi

Dunia kejahatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebagaimana tingkat kemajuan teknologi penunjang kehidupan manusia, demikian pula tingkat kejahatan akan beradaptasi dalam memanfaatkannya. Dalam konteks penanganan gangguan kamtibmas intensitas tinggi (GKIT), Korps Brimob harus mampu menempatkan dirinya untuk selalu lebih maju dari potensi

tantangan tugas yang dihadapi baik dalam bentuk kejahatan maupun kebencanaan.

Faktor efektifitas perintah, pengendalian, komunikasi dan penyebaran informasi adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penanggulangan GKIT. Sementara itu kualitas dari suatu perintah, proses pengendalian dan tingkatan respon juga membutuhkan kesadaran situasional (situational awareness) para komandan pada tiap rentang/tingkatan kendalinya (rentang kendali taktis, teknis dan operasional).

Seberapa baik kesadaran situasional yang dari pimpinan suatu unit yang digelar di lapangan maupun pusat kendali ditentukan

oleh kualitas informasi maupun data berupa gambaran lengkap situasi yang dihadapi dan potensi perkembangan di lapangan. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan konsep Network Centric Situational Awareness sebagai paradigma baru pengembangan TIK Korps Brimob Polri.

Network Centric Situational Awareness

Konsep NCSA bukanlah konsep fiksi teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi kepolisian. Konsep ini memiliki kemiripan namun bukanlah sebuah adaptasi konsep sistem manajemen pertempuran terintegrasi di kalangan militer (integrated battle management) yang pada

dasarnya mengintegrasikan sistem manajemen pertempuran dari unsur pengintai maupun unit-unit pelaksana pertempuran baik di darat, laut dan udara.

Implementasi konsep ini pada sektor layanan publik dilakukan pada banyak negara, konsep dasar ini diimplementasikan bahkan dengan mengintegrasikan layanan pengaduan dan respon dari beberapa entitas layanan kedaruratan tidak saja kepolisian namun juga layanan kedaruratan medis (emergency medical service) dan pemadam kebakaran.

Konsep dasar Network Centric Situational Awareness adalah menciptakan kesadaran situasional dari setiap level pimpinan operasi



baik di pusat kendali maupun di lapangan mengenai situasi yang dihadapi dan setiap dinamikanya melalui akses komunikasi suara, gambar dan data secara real time. Komunikasi gambar dan data yang diharapkan berupa hasil pengintaian/pemetaan udara udara dari drone, kamera badan individual, kamera kendaraan, CCTV maupun data GPS/gps tracker berupa akses-akses jalan, kedudukan dan pergerakan unit-unit kawan maupun obyek/target.

Prinsip utamanya adalah "I can

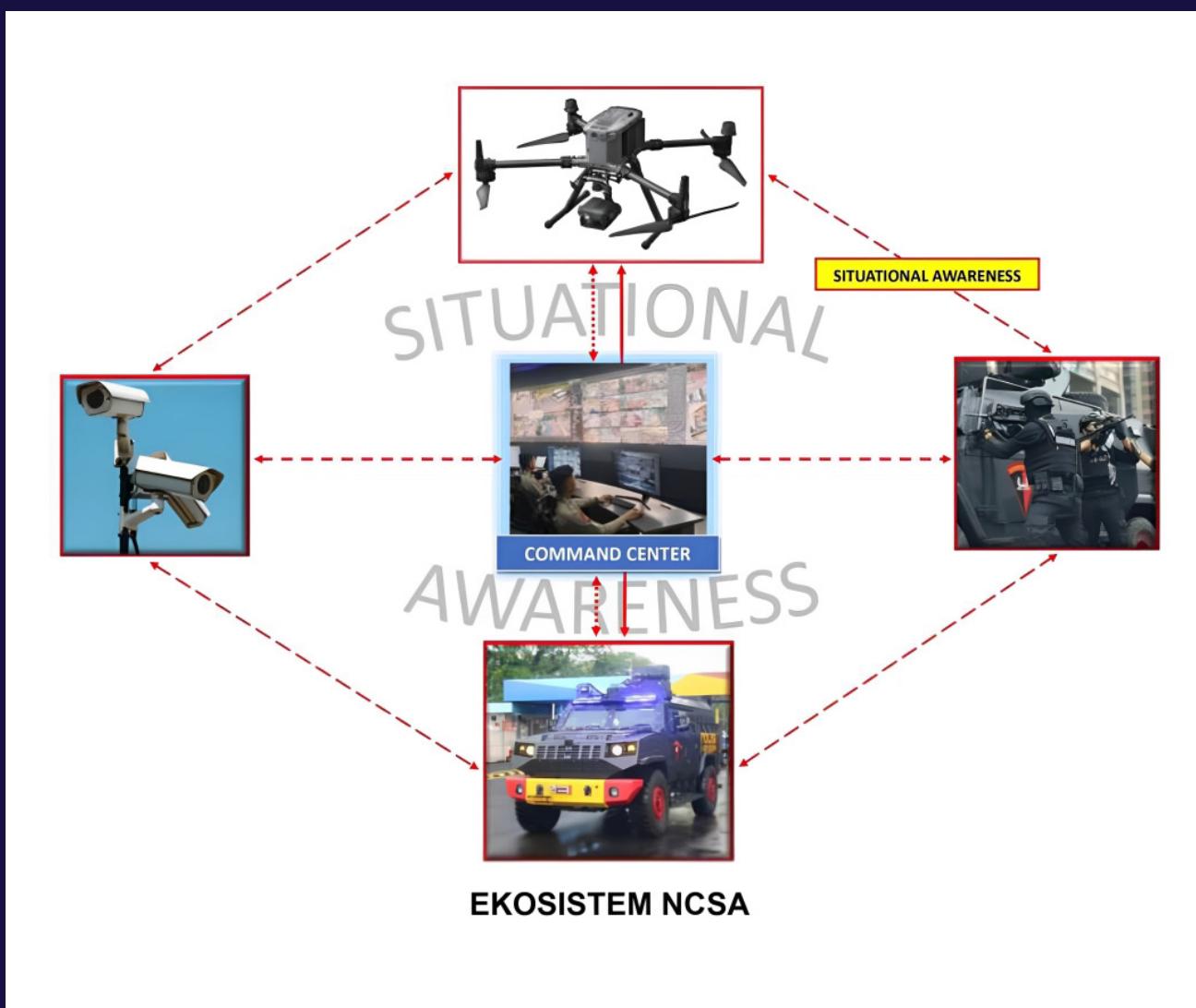
- see what you see, I can hear what you hear" atau apapun yang dilihat dan didengar oleh suatu unit akan dapat dilihat dan didengar pula oleh unit lainnya. Seluruh komunikasi suara dapat dilakukan melalui komunikasi radio maupun Voice over Internet Protocol (VoIP) atau memadukan keduanya, sedangkan komunikasi gambar dan data melalui satu link yang terintegrasi.

Adanya kesadaran situasional yang utuh dan komprehensif dari seluruh unit dan pimpinannya dilapangan maupun di pusat

- kendali diharapkan menghasilkan suatu pengambilan keputusan yang tidak saja cepat, tepat dan dapat diterapkan namun juga dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi Faktual dan Tantangan pengembangan NCSA

Upaya membangun NCSA di Korps Brimob Polri bukanlah sebuah upaya yang harus dibangun dari nol. Beberapa infrastruktur dan jaringan yang telah ada saat ini setidaknya telah membentuk sebuah platform awal yang sangat



terbuka untuk diintegrasikan bagi kelanjutan pembuatan desain dan pengembangan NCSA Korps Brimob. Beberapa wujud infrastruktur maupun jaringan yang telah ada saat ini adalah :

a. Infrastruktur dan Jaringan sistem jaringan Komunikasi Korps Brimob Polri yang terdiri dari jaringan komunikasi UHF 800 Mhz digital trunking dan analog serta Sistem Komunikasi radio broadband hytera

b. Infrastruktur dan aplikasi Command Center Korps Brimob

c. Infrastruktur dan aplikasi GPS Tracker, Automatic Volume Limiter System (AVLS) serta keberadaan unit drone

d. Infrastruktur dan aplikasi kamera CCTV Portable, Body Worm Secara temporal upaya

mengintegrasikan secara terbatas penggunaan/pemanfaatan beberapa fasilitas di atas pernah dilakukan dalam rangka pengamanan event maupun agenda kamtibmas sepanjang tahun 2021 hingga saat ini.

Dari gambaran di atas tampak jelas bahwa Upaya mewujudkan NCSA Korps Brimob memang masih jauh dari gambaran ideal, hal ini tidak lepas dari hambatan dan tantangan yang dihadapi yaitu :

a. Pemahaman sempit tentang TIK.

Pemahaman lingkup tugas TIK yang kurang tepat kerap mengakibatkan alokasi sumber daya TIK terutama SDM pada bidang yang sebenarnya bukan menjadi ranah tugas TIK seperti pengawalan pengoperasian

maupun pemeliharaan sound system maupun layar digital yang sifatnya bukan merupakan bagian dari sistem pemantauan/Jaringan Komunikasi Data kesatuan.

b. Ketergantungan terhadap penyedia

Dalam banyak hal, perangkat IT yang digunakan berasal dari beberapa penyedia/pabrikan beroperasi dengan link nya masing-masing yang saling mengunci dalam hal lisensi penggunaan dan pembaharuan. Hal ini berakibat adanya ketergantungan berkelanjutan terhadap penyedia tertentu.

c. Integrasi platform

Berbagai perangkat penginderaan baik berupa drone, CCTV, kamera badan dan kamera kendaraan umumnya berasal dari penyedia yang berbeda dan menggunakan link masing-masing yang tidak dapat diintegrasikan antara satu dengan lainnya.

d. Kesinambungan dalam Sistem Perencanaan dan Kebijakan

Konsistensi dalam kesinambungan menjadi kunci akhir bagi suksesnya upaya membangun sebuah NCSA Korps Brimob Polri. Ketika terjadi sedikit saja ketidak konsistenan, hampir dapat dipastikan ketidakberlanjutan dari sistem yang telah terbangun.

Terhadap tantangan tersebut, Korps Brimob Polri harus mulai menata langkah-langkah untuk mengatasinya. Upaya yang bersifat mendesak adalah mendorong komitmen para penyedia untuk dapat menyediakan sistem yang terbuka bagi upaya pengintegrasian. Selanjutnya Korps Brimob harus dapat mengembangkan sebuah link yang bersifat mandiri dibawah supervisi ataupun asistensi dari Divisi TIK Polri yang menjadi link yang menghubungkan seluruh perangkat yang terkait dalam NCSA, atau setidaknya menjadi link antar muka (interface) . [*]



Gerakan Pangan Murah, Kehadiran Polri di Tengah Masyarakat

Polri akan terus mendorong percepatan penyaluran beras SPHP sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Perum Bulog menggelar program bertajuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dalam program ini, Polri menyalurkan berbagai bahan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, hingga tepung dengan harga sesuai standar Perum Bulog.

Program ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok

dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi.

Dalam kick off GPM yang digelar pada Kamis, 14 Agustus 2025 di Kanwil Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri berupaya mendistribusikan bahan pokok di bawah harga eceran tertinggi (HET).

"Kita mencoba untuk memaksimalkan agar bahan pokok sampai langsung ke konsumen di bawah harga eceran tertinggi atau maksimal sama dengan harga tersebut," ujar Kapolri.

Melalui program ini, hingga 13 Agustus 2025 Polri telah mendistribusikan 5.706 ton beras SPHP di 4.705 titik. Pada hari yang sama, Polri juga menyalurkan 2.424 ton beras SPHP di 1.552 titik, dengan penerima manfaat lebih dari 480 ribu orang.





Untuk memaksimalkan penyaluran, Kapolri menargetkan program ini berlangsung hingga minggu ketiga Agustus.

"Gerakan Pangan Murah ini kita laksanakan sampai dengan tanggal 16 Agustus, tapi saya targetkan sampai minggu depan untuk memastikan penyaluran beras SPHP ini betul-betul maksimal," tambahnya.

Tepat Waktu

Kapolri juga menegaskan bahwa Polri akan terus mendorong

percepatan penyaluran beras SPHP sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari total 1,3 juta ton cadangan beras pemerintah yang dialokasikan tahun ini, Polri berkomitmen membantu memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.

"Mudah-mudahan secara periodik nanti setiap minggu kita akan evaluasi agar perintah dan kebijakan Bapak Presiden bisa kita laksanakan semaksimal mungkin," jelas Kapolri.

Tak hanya berpusat di Jakarta, Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjangkau berbagai wilayah di Indonesia dengan pola distribusi yang masif. Di Jakarta, selain acara kick-off di Kanwil Bulog DKI, Polda Metro Jaya menggelar GPM di Lapangan Presisi Ditlantas Jakarta Selatan. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terbukti beras kemasan 5 kilogram yang dijual seharga Rp55.000 langsung habis diserbu warga.



"Mudah-mudahan secara periodik nanti setiap minggu kita akan evaluasi agar perintah dan kebijakan Bapak Presiden bisa kita laksanakan semaksimal mungkin,"

Sementara itu, di Semarang, Jawa Tengah, Polda Jateng mengoordinasikan penyaluran 514 ton beras yang tersebar di 17 titik distribusi. Harga beras dijaga tetap terjangkau, yakni Rp11.000 per kilogram, dengan melibatkan seluruh Polres dan Polsek untuk memastikan pemerataan.

Di Palembang, Sumatera Selatan, GPM dilakukan di Polsek Seberang Ulu I dan Ilir Barat I. Agar distribusi lebih merata, warga dibatasi maksimal membeli dua

karung per keluarga. Harga beras pun disesuaikan dengan HET nasional dan regional, berkisar Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram.

Tidak ketinggalan, di Lampung, GPM berlangsung di Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya di Pasar Way Batu dengan tema "Polri untuk Masyarakat." Program ini menjadi bagian dari distribusi besar yang dilakukan di 35 titik pada 15 kabupaten/kota. Total beras yang disalurkan mencapai 3.930 ton,

menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah dengan volume distribusi terbesar.

Adapun di Malang, Jawa Timur, Polresta Malang Kota menyalurkan 48,5 ton beras SPHP pada tahap kedua, setelah sebelumnya menyalurkan 36 ton. Dengan demikian, total distribusi di Malang sudah mencapai 84,5 ton. Warga penerima manfaat menyebut kualitas beras yang didapat sangat baik, bahkan setara dengan beras premium di pasaran.





Apresiasi

Program yang dicanangkan Polri bersama Perum Bulog ini mendapatkan respons positif dari masyarakat. Melalui berbagai titik penyaluran yang tersebar di berbagai tingkat jajaran kepolisian, bahan pokok yang didistribusikan mampu terserap dalam hitungan jam.

Antusiasme ini terbukti dari ramainya antrean masyarakat di setiap titik penyaluran. Banyak masyarakat yang rela datang lebih awal demi mendapatkan beras maupun bahan pokok lainnya dengan harga terjangkau. Seperti misalnya di Tarakan, 400 karung berisi 5 kg beras terdistribusikan dalam waktu satu jam saja.

Andil Polri dalam proses pendistribusian bahan pokok ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, jejaring Polri yang sistematis memudahkan komando



dan koordinasi hingga ke seluruh wilayah.

Struktur berjenjang dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek memungkinkan setiap instruksi pendistribusian bahan pokok diteruskan secara cepat dan efektif.

"Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bulog, khususnya kepada Kapolri karena menginisiasi acara ini," kata Mendagri Tito Karnavian. [*]

KAPOLRI LANTIK WAKAPOLRI

dan Sejumlah Pejabat Utama Polri



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama (PJU) Mabes Polri hingga kapolda di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 19 Agustus 2025.

Prosesi sertijab kali ini mencakup pejabat berpangkat bintang tiga hingga bintang satu.

"Hari ini Bapak Kapolri melantik Bapak Irwasum dan Kapolda Sulbar. Kemudian, ada sertijab untuk enam

PJU Mabes Polri dan enam jabatan kapolda," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di lokasi pelantikan.

Menurut Irjen Sandi, rotasi jabatan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi di tubuh Korps Bhayangkara. "Ini bentuk tour of duty dan tour of area," jelasnya.

Pelantikan tersebut di antaranya menetapkan Komjen Wahyu Widada sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri menggantikan Komjen Dedi

Prasetyo, serta Irjen Adi Deriyan Jayamarta sebagai Kapolda Sulawesi Barat. Sebelumnya, Komjen Wahyu menjabat Kabareskrim Polri, sementara Irjen Adi merupakan Staf Ahli Bidang Manajemen Kapolri.

Untuk PJU Mabes Polri yang melaksanakan sertijab, di antaranya adalah Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, Kabaintelkam Polri Komjen Akhmad Wiyagus, Asisten Operasi (Asops) Kapolri Komjen M. Fadil Imran, Kabaharkam Polri



“Kami siap melanjutkan tugas dan mendukung penuh Kapolri dalam menjalankan amanah, agar manfaat program Asta Cita dapat segera dirasakan masyarakat,”

Irjen Karyoto, Kadiv Hubinter Polri Brigjen Amur Chandra Juli Buana, dan Kapsusjara Polri Kombes Vincentius Bagas Uji Nugroho.

Tiga nama terakhir akan mendapat kenaikan pangkat satu bintang sesuai jabatannya.

Sedangkan enam kapolda yang menjalani sertijab yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, Kapolda Kaltara Brigjen Djati Wiyoto Abadhy, Kapolda Gorontalo Irjen Widodo, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto, Kapolda Banten Brigjen Hengki, dan Kapolda Aceh Brigjen Marzuki Ali Basyah.



Empat kapolda yang masih berpangkat Brigjen akan naik pangkat menjadi Irjen.

Pada kesempatan sebelumnya, Kapolri juga telah melantik Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Sabtu 16 Agustus 2025.

Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri, berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar.

Dalam kesempatan itu, Komjen Dedi sekaligus menyerahkan jabatan lamanya sebagai Irwasum Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menuturkan, Komjen Dedi menyatakan komitmennya mendukung penuh Kapolri dalam menjalankan amanah.

“Selain pelantikan, hari ini juga dilakukan penyerahan jabatan Irwasum dari beliau kepada Kapolri,” ujar Sandi.

Komjen Dedi menegaskan akan bekerja maksimal mendukung kebijakan dan program strategis Polri, khususnya dalam merealisasikan Program Asta Cita sebagai arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI.

“Kami siap melanjutkan tugas dan mendukung penuh Kapolri dalam menjalankan amanah, agar manfaat program Asta Cita dapat segera dirasakan masyarakat,” tegasnya. [*]

Truk Hias Polri Raih Suara Terbanyak di Karnaval Kemerdekaan

Sorak-sorai penonton pecah ketika sebuah truk raksasa berbalut ornamen budaya dan replika kepala polisi dengan topi dinas melintas di jalan utama kawasan Monumen Nasional, Minggu malam, 17 Agustus 2025.

Kendaraan itu adalah truk hias Polri, yang malam itu tampil paling mencolok dalam Karnaval Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Tidak sekadar memamerkan kreativitas, mobil karnaval Polri berhasil memikat publik. Dalam voting online kategori "Peringkat Kreativitas Hias Truk", Polri menduduki peringkat pertama dengan 69.921 suara. Angka itu jauh melampaui pesaing terdekat, yakni Badan Gizi Nasional (45.932 suara) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (42.953 suara).

Dengan mengusung tema "Polri untuk Masyarakat", truk hias ini menampilkan figur Hanoman sebagai simbol kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kerendahan hati. Pilihan karakter wayang ini seakan menegaskan komitmen Polri dalam melayani rakyat sekaligus mengawal program-program pemerintah.

Di sekeliling kendaraan, pasukan pengiring berjalan dalam balutan kostum penuh makna. Ada yang membawa simbol ketahanan pangan melalui replika padi, jagung, tebu, dan bawang putih. Ada pula rombongan dengan busana Prajurit Majapahit yang melambangkan kejayaan sejarah bangsa, serta perwakilan adat Minahasa yang menggambarkan semangat keberanian. Irama Baleganjur Bali yang riuh menambah semarak, melambangkan keharmonisan antara manusia, budaya, dan alam.



Sejak sore, ribuan warga sudah tumpah ruah memenuhi kawasan Monas. Anak-anak berlari membawa bendera kecil, sementara pedagang kaki lima meramaikan suasana. Ketika karnaval dimulai, kerumunan seakan larut dalam pesta rakyat. Truk-truk yang disulap menjadi replika kantor kementerian, ruang kelas, kapal perang, hingga ornamen budaya Nusantara satu per satu melintas di depan panggung kehormatan.

Sebanyak 32 kendaraan ikut serta dalam karnaval ini. Ada yang tampil sendiri, ada pula yang berbagi wahana dengan institusi lain. Semua berlomba menunjukkan kreativitas, tetapi Polri menjadi salah satu yang paling menyita perhatian.

Dari panggung utama, Presiden Prabowo Subianto berdiri berdampingan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sesekali keduanya melambaikan

tangan ke arah penonton, bahkan memberi hormat kepada peserta karnaval. Kehadiran Presiden baru di perayaan kemerdekaan ini menambah semangat massa yang sejak awal sudah berteriak penuh antusiasme.

Sementara itu, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut meninjau jalannya pawai.

Hasil Voting
Peringkat Kreativitas

Total Suara Masuk: 299.455 Vote
Terakhir diperbarui 19 Agustus 2025 13.55 WIB

	Nomor Urut 29	69.921 Vote
	Nomor Urut 9	45.932 Vote
	Nomor Urut 18	42.953 Vote
	Nomor Urut 10	37.035 Vote
	Nomor Urut 16	15.740 Vote
	Nomor Urut 28	15.512 Vote

Kehadiran mereka langsung disambut hangat oleh masyarakat. Banyak warga berebut mendekat, berswafoto, dan melambaikan tangan. Kapolri memastikan rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan meriah tanpa gangguan berarti.

Karnaval Kemerdekaan kali ini bukan hanya pesta hiburan, tetapi juga wadah bagi instansi pemerintah untuk menampilkan program unggulan mereka dalam



• bentuk kendaraan hias. Kreativitas, budaya, dan pesan kebangsaan berpadu menjadi tontonan sekaligus tuntunan.

• Bagi Polri, kemenangan dalam voting truk hias bukan semata soal popularitas. Lebih dari itu, ia menjadi simbol penerimaan masyarakat atas upaya Polri yang terus bertransformasi hadir, mengayomi, dan melayani rakyat dengan rendah hati, sembari menjaga persatuan bangsa. [*]



Menuju Sejuta Hektare Jagung:

Kiprah Polri Gandeng Pondok Pesantren

Jawa Timur menjadi wilayah strategis karena mayoritas penduduknya beragama Islam dengan banyak pesantren yang memiliki lahan produktif.

Lahan sepuluh hektare yang terhampar di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur itu benar-benar siap ditanami. Tanah milik Pondok Pesantren Tebuireng itu menjadi saksi awal kolaborasi besar antara Polri dan pondok pesantren memperkuat ketahanan pangan nasional melalui komoditas jagung.

Mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memimpin kegiatan penanaman jagung pada Rabu, 6 Agustus 2025.

"Alhamdulillah, hari ini kita sudah melakukan kegiatan tanam serentak jagung dengan berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh pondok pesantren. Baik khususnya di Jawa Timur ada kurang lebih 264 pondok pesantren dengan luas tanah 500 hektare," kata Wakapolri.

Aksi penanaman jagung di Jombang tersebut merupakan bagian dari penanaman serentak yang melibatkan 745 pondok pesantren di 33 provinsi dengan lebih dari 65 ribu santri. Polri, kata Wakapolri, mengambil peran penting dalam memperkuat swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. "Swasembada pangan ini merupakan kerja kolaborasi, bersinergi, dan semua harus mengambil peran."

Peran Strategis Pesantren

Kepala Satgas Ketahanan Pangan Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ari Wibowo, menjelaskan bahwa Jawa Timur menjadi

wilayah strategis karena mayoritas penduduknya beragama Islam dengan banyak pesantren yang memiliki lahan produktif. "Mereka punya banyak lahan yang bisa dikembangkan, digandengkan dengan program Asta Cita untuk menanam jagung," kata dia.

Di Jawa Timur, Polda Jawa Timur telah melakukan penanaman di lahan seluas 226,53 hektare yang terdiri dari 1.717 hektare lahan binaan dan 509,37 hektare lahan milik pesantren. Dari penanaman itu, diperkirakan menghasilkan panen lebih dari 17 ribu ton. Program ini melibatkan 82 ribu santri dari 264 pesantren, masing-masing didampingi





satu polisi penggerak dan satu kelompok tani.

Program ini menuai apresiasi dari pemerintah daerah maupun pusat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Much. Rony, menilai jagung masih sangat dibutuhkan di Jawa Timur, mengingat produksi 6,21 juta ton belum mampu menutup kebutuhan konsumsi yang mencapai 13,49 juta ton.

Gerakan ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran, yang menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Program tersebut diwujudkan lewat pembangunan lumbung pangan, pencetakan sawah baru, hingga menjamin ketersediaan benih, pupuk, dan pestisida. Polri mengambil peran dengan fokus pada jagung, sementara TNI memfokuskan pada padi.

Sejak Desember 2024, Polri sudah meluncurkan program Polisi Penggerak Ketahanan Pangan (P2KP) dan melatih lebih dari 6.600 personel. Bahkan, gerakan tanam padi serentak seluas 10 ribu hektare juga pernah digelar di tujuh provinsi.

Wakapolri menyebut bahwa hingga kuartal II-2025, penanaman jagung sudah mencapai 455 ribu hektare dari target 1 juta hektare.

“Kuartal III ini sudah ditanam jagung di lahan seluas 440 ribu hektare dari target 1 juta hektare oleh Polri bersinergi dengan seluruh komponen bangsa,” ujarnya.

Bila target itu tercapai, produksi jagung tahun ini diproyeksikan mencapai 4 juta ton. Data Badan Pusat Statistik bahkan menunjukkan, produksi jagung pada Januari-Juni 2025 meningkat 1,38 juta ton atau 19,3 persen dibanding periode yang sama pada 2024.

Infrastruktur dan Dukungan
Selain menanam, Polri juga menyiapkan infrastruktur pascapanen. Hingga kini, sudah ada 18 gudang jagung di 12 provinsi dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton. Gudang ini diharapkan bisa menampung hasil panen petani, menjaga kestabilan harga, sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional.

Dukungan peralatan pertanian pun terus diberikan: mulai dari traktor besar dan tangan, alat



pemipil dan pengering jagung, hingga pupuk dan benih. Polri juga bekerja sama dengan pengusaha pakan ternak seperti PT Japfa dan PT Charoen Pokphand untuk menyerap hasil panen.

Satgas Pangan Polri bertugas mengawal distribusi bibit dan pupuk, mengembangkan inovasi bibit unggul, serta memantau perkembangan lewat aplikasi digital. Hingga kini, Polri membina hampir 859 ribu petani dalam 46 ribu kelompok tani di seluruh Indonesia.

Apresiasi Presiden

Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi langsung atas kontribusi Polri dalam

bidang pangan. "Pencapaian Polri dalam mengambil peran ini, saya memberikan apresiasi," kata Dedi mengutip pernyataan Presiden saat panen raya di Bengkayang, Kalimantan Barat, Juni lalu.

Bagi Presiden, ketahanan pangan adalah tonggak ketertiban dan keamanan masyarakat. "Ketika ketahanan pangan bisa diwujudkan, maka keberlangsungan pembangunan akan berjalan lancar," ucap Dedi.

Dengan target 1 juta hektare penanaman jagung hingga akhir 2025, Polri terus memperluas kerja sama. Kementerian Kehutanan menyediakan 349 ribu hektare perhutanan sosial, Perhutani 20 ribu

hektare, KOKAM Muhammadiyah 10 ribu hektare, dan pesantren hampir 1.000 hektare.

Program ini bukan sekadar meningkatkan produksi jagung, tetapi juga menjadi simbol peran Polri di luar fungsi penegakan hukum. Dari menjaga distribusi pangan, mendampingi petani, hingga membangun gudang dan koperasi, Polri menegaskan komitmennya mendukung Asta Cita Kemandirian Pangan.

Dengan kolaborasi semua elemen bangsa, Indonesia menatap optimis kemandirian pangan, memperkuat ekonomi nasional, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. [*]





Gampong Kameng Farm:

Usaha Mandiri Bhabinkamtibmas Aceh Besar

Bhabinkamtibmas Aceh ini membuktikan: mengurus keamanan bisa sejalan dengan beternak kambing. Kisahnya inspiratif!



Di sebuah kandang kayu yang berlokasi di Gampong Lamjamee, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, suara kambing mengembik terdengar bersahut-sahutan. Suara tersebut seakan menyambut empunya yang datang sambil membawa seember penuh pakan hijauan.

Meski masih mengenakan seragam dinas polisi lengkap dengan ban lengan bertuliskan Bhabinkamtibmas, ia tak ragu melangkah masuk ke lorong kandang.

Satu per satu ia sambangi kambing peliharaannya, lalu ia menuangkan pakan hijauan ke palung kayu. Sese kali ia mengusap kepala kambing yang mendekat, sementara hewan-hewan itu segera menyantap pakan dengan lahap.

Itulah rutinitas setiap sore yang dijalani oleh Aipda Teuku Abdullah, seorang Bhabinkamtibmas Gampong Turam, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Usai bertugas di lapangan, ia selalu menyempatkan waktu untuk mengurus ternaknya.

Selain menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Aipda Teuku Abdullah sudah sejak 2018 menekuni usaha ternak kambing sejak 8 tahun terakhir.

Aipda Teuku Abdullah bercerita, peternakan yang ia bangun ini bermula dari kecintaannya terhadap hewan yang sudah tumbuh sejak kecil. Ketertarikannya itu membuatnya betah merawat kambing di sela waktu luang.

“Kebetulan senang dengan hewan, lalu coba-coba ternak hewan kambing etawa dan alhamdulillah didukung keluarga untuk punya usaha mandiri, di samping tugas kami sebagai Bhabinkamtibmas,” kata Teuku Abdullah.

Perlahan, jumlah ternak kambingnya kian bertambah, Teuku Abdullah kemudian memutuskan untuk memberikan usaha ternaknya itu dengan nama Gampong Kameng Farm, sebuah nama yang memiliki arti Desa Peternakan Kambing.

“Nama ini saya ambil bentuk motivasi dan semangat dalam membangun usaha,” jelas Aipda Teuku Abdullah.

Hingga kini, di pertanakannya tersebut, Aipda Teuku Abdullah memiliki 100 ekor kambing yang terdiri dari 50 ekor kambing





pejantan dan 50 ekor kambing betina.

Keberlangsungan usaha ternak kambingnya ini tak terlepas dari potensi pakan yang melimpah di sekitarnya. "Potensi di daerah sini kalau pakan itu melimpah," kata dia.

Hasil ternak kambing tak hanya terbatas pada penjualan hewan saja. Dari peternakannya, ia juga mendapatkan berbagai produk yang bernilai ekonomi, seperti susu kambing etawa dan bibit kambing berkualitas untuk dijual atau dikembangbiakkan.

Kambing-kambing yang dipeliharanya pun laris manis terutama saat momen spesial seperti hari raya Idul Adha dan acara aqiqah, di mana permintaan akan kambing etawa meningkat tajam.

"Hasil dari ternak kambing etawa ini juga saya gunakan untuk keperluan keluarga," jelas Teuku Abdullah.

Pupuk Organik

Selain memberikan keuntungan dari penjualan kambing dan produknya, kotoran kambing yang dihasilkan peternakannya tersebut memiliki nilai guna yang tidak kalah penting. Teuku Abdullah memanfaatkan kotoran tersebut sebagai pupuk organik untuk lahan pertanian di sekitar kandang. Pupuk organik ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, melainkan ia juga membagikan pupuk organik tersebut kepada warga sekitar sebagai bentuk kontribusi dan dukungan terhadap pertanian lokal.

Beternak kambing bagi Teuku Abdullah bukan sekadar usaha sampingan. Baginya, usahanya ini tidak mengganggu tugasnya sebagai anggota Polri, melainkan usahanya ini justru menjadi sarana untuk mempererat hubungan dengan masyarakat di wilayah





tugasnya. Setiap sore, setelah menyelesaikan tugas sebagai Bhabinkamtibmas, ia menyempatkan diri untuk merawat kambing dan sekaligus berinteraksi dengan warga sekitar.

“Saya setiap sore setelah pulang dari dinas selalu mencari makan hewan ternak sembari bertemu dan bergaul serta berbagi ilmu tentang peternakan kambing dengan warga,” ujar Aipda Teuku Abdullah.

Interaksi tersebut membuatnya lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat tali silaturahmi dan kepercayaan publik kepada petugas keamanan. Pendekatan seperti ini penting untuk menjaga kondusivitas dan keharmonisan di lingkungan tempat tinggalnya. [*]



Mengubar Rawa Menjadi Ladang Harapan

Kisah Aiptu Karyanto, Polisi Banjarbaru yang Menyulap Lumpur Jadi Sumber Kehidupan





Sore itu, matahari condong ke barat, meninggalkan cahaya keemasan yang memantul di permukaan rawa. Air yang tenang beriak pelan diterpa angin, sementara di tepiannya tumbuh ilalang setinggi pinggang. Bagi sebagian orang, rawa ini tak lebih dari tanah mati: sarang nyamuk, penuh lumpur, dan tak mungkin menghasilkan apa-apa.

Namun, di mata Aiptu Karyanto, seorang Bhabinkamtibmas di Banjarbaru, rawa itu adalah kanvas kosong yang menunggu untuk dilukis ulang. "Kalau kita mau sedikit kerja keras, rawa ini bisa jadi rezeki," katanya suatu ketika, sambil menunjuk genangan air yang bagi warga lain hanya jadi beban.

Karyanto bukan orang asing di wilayah ini. Setiap hari ia menyusuri jalan setapak,

• singkah di rumah-rumah warga, mendengar keluhan, dan menenangkan hati.

Dari obrolan panjang itulah ia tahu bahwa masalah terbesar masyarakat bukan hanya soal keamanan, tapi juga ekonomi. Banyak kepala keluarga hanya bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, tanpa kepastian.

Ada alasan mengapa Karyanto begitu peka terhadap keresahan masyarakat. Ia sendiri pernah hidup dalam keterbatasan. Lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil, masa kecilnya dipenuhi dengan kerja keras. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya berdagang sayur keliling dengan sepeda tua.

Sejak kecil Karyanto terbiasa membantu, entah dengan ikut mencangkul di sawah, menggembala kambing, atau sekadar



menimba air. "Saya tahu rasanya ketika dapur tak ada asap. Itu sebabnya saya bisa merasakan apa yang warga rasakan," ujarnya pelan ketika mengenang masa kecilnya.

Suatu hari, ketika tengah berpatroli di wilayah binaannya, ia berhenti lama di tepi rawa. Bayangan pohon kelapa yang miring tampak seperti garis hidup yang hampir patah. Di sutilah ia mendapat ide: rawa ini harus diubah menjadi tambak ikan. "Ide itu sederhana saja. Kalau ada air, mestinya bisa ada kehidupan," kenangnya.

Mewujudkan ide itu bukan perkara mudah. Saat ia pertama kali menyampaikan rencananya ke warga, tanggapan yang muncul kebanyakan berupa tawa kecil, sinis, bahkan penolakan. "Ah, Pak Polisi, jangan mimpi. Rawa itu dari dulu ya begitu," ujar seorang warga dengan nada pasrah.

"Saya tahu rasanya ketika dapur tak ada asap. Itu sebabnya saya bisa merasakan apa yang warga rasakan,"

Tetapi Karyanto tidak mundur. Ia mulai dari langkah kecil: membersihkan sebagian rawa, menggali sedikit lebih dalam, lalu mengalirkan air bersih. Ia meminjam pompa tua dari temannya, menguras lumpur yang berlebihan, dan menunjukkan bahwa rawa itu bisa ditata.

Ia kemudian menghubungi dinas perikanan, memohon pelatihan budidaya ikan air tawar untuk warga. Bibit lele dan nila datang sebagai

dukungan awal. Meski banyak yang masih ragu, beberapa keluarga mulai ikut mencoba. "Kalau gagal, ya rugi sedikit. Tapi kalau berhasil, bisa jadi jalan keluar," kata seorang bapak yang kemudian menjadi anggota kelompok tambak binaan.

Panen Perdana

Berbulan-bulan kemudian, tiba-tiba hari yang ditunggu: panen pertama. Dengan jala seadanya, warga turun ke rawa. Gelak tawa pecah ketika jala diangkat, penuh



dengan ikan nila yang melompat-lompat. Karung demi karung diisi, tangan-tangan berlumuran lumpur, tapi wajah mereka bersinar.

Bagi banyak warga, itu adalah momen pertama mereka merasakan hasil nyata dari kerja kolektif. Seorang ibu tak kuasa menahan air mata ketika menjual ikan hasil panen di pasar desa. "Dulu saya hanya mengandalkan uang kiriman anak. Sekarang, saya bisa ikut membantu rumah tangga," ujarnya sambil tersenyum bangga.

Hasil panen itu mengubah banyak hal. Kini, rawa yang tadinya dianggap kutukan berubah menjadi sumber harapan. Penghasilan warga meningkat; sebagian bisa menyekolahkan anak lebih tinggi, sebagian lainnya membeli motor untuk usaha, bahkan ada yang mampu merenovasi rumah.

Anak-anak muda yang dulunya hanya nongkrong tanpa arah kini ikut membantu di tambak. Mereka belajar memberi pakan, menjaga air, bahkan mengelola pemasaran lewat media sosial. Perlahan tapi pasti, lahirlah komunitas petani ikan binaan Aiptu Karyanto. "Pak Karyanto itu bukan hanya polisi bagi kami. Dia guru, sekaligus bapak," ungkap seorang pemuda desa.

Karyanto sendiri tidak pernah menganggap tindakannya istimewa. Baginya, menjadi polisi berarti hadir di tengah masyarakat, menyelesaikan masalah dari akarnya. "Keamanan itu tak bisa lepas dari kesejahteraan. Kalau warga punya pekerjaan dan harapan, mereka juga lebih tenang," ujarnya. Seragam cokelatnya mungkin menunjukkan kewenangan, tetapi sikap rendah hati dan tangan yang mau kotor di lumpur membuat warga melihatnya lebih dari sekadar aparat. Ia adalah bagian dari mereka.

Kini, tambak-tambak ikan di Banjarbaru berdiri kokoh. Setiap kali melintas, suara percikan air dan tawa anak-anak menjadi pengingat bahwa sebuah ide kecil bisa membawa perubahan besar. Warga percaya, kisah Aiptu Karyanto akan lama dikenang. Ia bukan hanya menyulap rawa menjadi tambak, tapi juga menyulap rasa putus asa menjadi harapan. Dan di tanah rawa yang dulu terabaikan itu, lahirlah cerita tentang seorang polisi sederhana yang memilih jalan berbeda: tidak sekadar menjaga keamanan, tapi menumbuhkan kehidupan. [*]



Hadiah Umroh untuk Sang Pelopor “Razia Perut Lapar”



Program Razia Perut Lapar, mengantar Bripka Zulhamsyah dari lorong sempit menuju Tanah Suci.

Air mata kebahagiaan itu menetes di pipi Bripka Zulhamsyah. Anggota Intelkam Polresta Tanjungpinang itu tak pernah menyangka, langkah kecilnya berbagi makanan untuk kaum dhuafa berbuah hadiah istimewa: perjalanan umroh ke Tanah Suci Makkah.

Hadiah itu datang langsung dari Kapolda Kepulauan Riau, Inspektur Jenderal Polisi Asep Safrudin, saat kunjungan kerja ke Polresta Tanjungpinang, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Kapolda Kepri pun mengakui, program yang dijalankan anak buahnya itu sejalan dengan visi besar pemerintah: meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Saya tahu di Tanjungpinang ada personel yang secara konsisten menjalankan operasi Razia Perut Lapar. Ini program baik dan patut diapresiasi,” kata Irjen Asep Safrudin.





Dengan nada hangat, sang jenderal bertanya apakah Zulhamsyah pernah menginjakkan kaki di Tanah Suci. Jawaban lirih Zulhamsyah, "belum pernah, Jenderal," langsung dijawab dengan senyum dan sebuah kejutan besar: paket umroh gratis.

Zulhamsyah, yang sehari-hari lebih dikenal masyarakat lewat program sosial Razia Perut Lapar (RPL), hanya bisa terharu. "Siap, Jenderal. Terima kasih atas kebaikan Jenderal," ucapnya sambil menyeka air mata.

Bagi warga Tanjungpinang, terutama mereka yang tinggal di kawasan hinterland dan pemukiman miskin, sosok Zulhamsyah bukan nama asing.

Sejak lima tahun terakhir, ia rutin berkeliling membawa makanan siap saji dan sembako. Kadang dari uang pribadi, kadang pula dari donasi warga yang menitipkan rezeki untuk dibagikan. Buruh pelabuhan, pemulung, tukang ojek, hingga keluarga prasejahtera, semua pernah merasakan sentuhan tangan hangatnya.



Empati Sejak Dini

Zulhamsyah bukan polisi biasa. Dibesarkan oleh seorang ibu tunanetra, ia selalu diajarkan untuk peka terhadap penderitaan orang lain. Ibunya wafat pada September 2024, tetapi pesan terakhirnya terus ia ingat:

"Tetaplah berbuat baik, Nak. Jika ibu sudah tiada, tetaplah membantu mereka yang kelaparan. Kebaikanmu akan menolongmu di dunia dan akhirat."

Program RPL telah berlangsung selama empat tahun tanpa henti. Zulhamsyah mengandalkan niat baik, sebagian gaji sendiri, dan bantuan teman-temannya. Konsistensi ini membuatnya dikenal luas di Kepulauan Riau.

Di pasar tradisional, di tepi laut, dan di gang-gang sempit, warga selalu menanti kedatangannya. Anak-anak berlarian menyambutnya, pedagang kecil tersenyum saat menerima bingkisan, dan pemulung menyalami tangan yang memberkati mereka. Setiap interaksi kecil itu mengukir jejak kebaikan nyata.



"Tetaplah berbuat baik, Nak. Jika ibu sudah tiada, tetaplah membantu mereka yang kelaparan. Kebaikanmu akan menolongmu di dunia dan akhirat."





Setiap paket yang ia bagikan bukan sekadar makanan, tapi simbol perhatian dan empati. Dari lorong-lorong kota hingga perkampungan kumuh, dari pasar hingga pelabuhan, Zulhamsyah hadir sebagai polisi sekaligus pelayan masyarakat.

Selain dana pribadi, ia juga menyalurkan bantuan dari warga yang ingin bersedekah. Bantuan tersebut biasanya diberikan kepada buruh pelabuhan, pemulung, tukang ojek, hingga warga pemukiman miskin.

Perhatian Tulus

Setiap interaksi kecil selalu diwarnai senyum, doa, dan perhatian tulus. "Ayo makan, Bapak, Ibu. Ini rezeki dari orang-orang baik," katanya dalam sebuah video yang sempat viral di media sosial.

Seorang ibu pemulung mengaku terharu: "Polisi datang ke tempat seperti ini, berbagi makanan bergizi untuk kami. Semoga ada lebih banyak polisi seperti Bapak ini," katanya dengan mata berkaca-kaca.

Kegiatan RPL mendapat apresiasi dari berbagai pihak: Gubernur Kepulauan Riau, Kapolda Kepri, anggota DPR RI, Lembaga Adat Melayu Kepri, BAZNAS, hingga tokoh lintas agama. Ketua I Lembaga Adat Melayu Kepri, Dato Atmadinata, bahkan mendoakan Zulhamsyah agar dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Perwira dan terus membawa nama baik kepolisian.

Bripka Zulhamsyah membuktikan bahwa polisi bisa hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga pelayan kemanusiaan. Ia mengubah lapar menjadi senyum, kesulitan menjadi harapan, dan kepedulian menjadi inspirasi.

Penghargaan umroh dari Kapolda Kepri hanyalah simbol kecil dari dedikasi besar yang ia tunjukkan. Sebab bagi Zulhamsyah, kebaikan hati yang konsisten adalah hadiah terbesar.

Dalam setiap langkahnya, ia menunjukkan bahwa hati yang tulus mampu menebar cahaya di lorong-lorong gelap kehidupan, memberi harapan, dan menginspirasi orang lain untuk menebar kebaikan pula. [*]

Polisi Turun Tangan

Bersihkan Sampah Pasca Demo di Pati



Dari panasnya aksi, berlanjut pada momen kepedulian lingkungan

Aksi unjuk rasa besar yang mendesak mundurnya Bupati Sudewo memang sudah selesai, tetapi jejaknya masih tertinggal: tumpukan sampah, jalan macet, dan rasa penasaran warga yang berdatangan untuk sekadar melihat lokasi.

Sementara itu, sampah berupa botol plastik, kertas, kardus, hingga potongan kayu menumpuk usai ribuan massa meninggalkan lokasi unjuk rasa.

Puluhan personel gabungan dari Polri, TNI, hingga Satpol PP bersama warga sekitar bergotong royong membersihkan sampah yang berserakan di kawasan Alun-alun serta halaman Kantor Bupati Pati, Rabu 13 Agustus 2025.

Suasana Alun-alun Pati yang sebelumnya riuh oleh aksi unjuk rasa melengserkan Bupati Sudewo, sore itu berubah menjadi ajang gotong royong. Bukan lagi teriakan massa yang terdengar, melainkan suara sapu lidi yang bergesekan dengan aspal dan botol plastik yang dikumpulkan dalam kantong-kantong sampah.

Meski telah seharian berjaga mengawal jalannya aksi, anggota kepolisian, termasuk sejumlah polwan, tidak langsung pulang.



Mereka tetap tinggal untuk memastikan halaman Kantor Bupati kembali bersih dan nyaman digunakan publik.

Mereka berganti peran dari penjaga keamanan menjadi penyapu jalan dan membersihkan botol-botol plastik, gelas air mineral, hingga potongan kayu.

Wajah Humanis

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan bahwa aksi bersih-bersih ini adalah bagian dari kepedulian aparat terhadap lingkungan.

"Kami ingin menunjukkan bahwa tugas polisi bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjaga kebersihan demi kenyamanan masyarakat. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab bersama," kata Jaka.

Menurutnya, inisiatif ini juga merupakan bentuk edukasi sosial. "Setiap kegiatan, apalagi yang melibatkan massa, harus tetap diakhiri dengan tanggung jawab, termasuk membersihkan lokasi," tambahnya.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menilai kegiatan ini sebagai langkah nyata memulihkan kondisi pasca-aksi.

"Polri hadir tidak hanya untuk mengawal jalannya unjuk rasa agar tertib, tetapi juga memastikan lingkungan tetap bersih dan kondusif. Ini juga teladan bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama," jelasnya.

Pemandangan petugas keamanan memunguti sampah rupanya mengundang



“Kalau polisi bisa turun langsung membersihkan sampah, masa kita sebagai warga tidak malu kalau masih buang sampah sembarangan?”

simpati warga yang kebetulan melintas. Tidak sedikit masyarakat kemudian turut serta membantu mengangkat kardus, botol, hingga menyapu jalanan.

Seorang warga yang ikut membantu menyebut aksi itu menumbuhkan suasana adem setelah beberapa hari terakhir kota Pati memanas akibat polemik kenaikan pajak hingga 250 persen. “Kalau polisi bisa turun langsung membersihkan sampah, masa kita sebagai warga tidak malu kalau masih buang sampah sembarangan?” ujarnya.

Di media sosial, sejumlah warganet menilai aksi sederhana itu sebagai wujud ‘aksi humanis’ aparat. Banyak yang berkomentar bahwa inilah sisi polisi yang ingin mereka lihat bukan hanya hadir saat massa panas, tapi juga ikut merawat ruang publik agar tetap nyaman.

Tindakan kecil ini dinilai berdampak besar: mengembalikan keindahan kota, membangun kembali kepercayaan warga, sekaligus memberi contoh tentang arti tanggung jawab sosial.

Dari momen ini, aparat ingin menunjukkan bahwa polisi yang humanis bukan hanya soal senyum dan sapa, tetapi juga hadir memberikan manfaat nyata bahkan lewat hal sederhana seperti membersihkan sampah. [*]



80

Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju



PENGAMANAN HUMANIS 'POLRI UNTUK MASYARAKAT' DI TENGAH KARNAVAL KEMERDEKAAN

DIVISI HUMAS POLRI



**INOVASI
DIVHUMAS**
Biro Penmas Polri
Majalah Tribrata News
Tersedia Online



www.humas.polri.go.id